



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2019**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI
TERMOHON SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI
(TAMBAHAN) TERMOHON
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 20 JUNI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019

PEMOHON

1. Prabowo Subianto
2. Sandiaga Salahuddin Uno

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Termohon Serta Pengesahan Alat Bukti (Tambahan) Termohon (IV)

**Kamis, 20 Juni 2019, Pukul 13.07 – 15.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Yunita Rhamadani
Syukri Asy'ari
Hani Adhani
Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar
Anak Agung Dian Onita
Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. T. M. Luthfi Yazid
2. Iwan Satriawan
3. Iskandar Sonhadji
4. Dorel Almir

B. Termohon:

1. Arief Budiman
2. Wahyu Setiawan
3. Ilham Saputra
4. Hasyim Asy'ari
5. Viryan

C. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Ali Nurdin | 9. Deni Martin |
| 2. Arif Effendi | 10. Acep Andriyanto |
| 3. Muhammad Rudjito | 11. Rian Wicaksana |
| 4. Budi Rahman | 12. Ridwan Saleh |
| 5. Subagio Aridarmo | 13. Mohammad Agus Riza |
| 6. Agus Koswara | 14. Setya Indra Arifin |
| 7. Bagas Irawanputra | 15. Sigit Joyowardono |
| 8. Syamsudin Slawat | |

D. Ahli dari Termohon:

Marsudi Wahyu Kisworo

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Yusril Ihza Mahendra | 11. Juri Ardiantoro |
| 2. Taufik Basari | 12. Arteria Dahlan |
| 3. Ade Irfan Pulungan | 13. Ikhsan Abdullah |
| 4. I Wayan Sudirta | 14. Erlinda |
| 5. Luhut Pangaribuan | 15. Eri Hertiawan |
| 6. Teguh Samudera | 16. Arsul Sani |
| 7. Fahri Bachmid | 17. M. Iqbal Sumarlan |
| 8. Hermawi Taslim | 18. Christophorus Taufik |
| 9. Pasang Haro Rajaguguk | 19. Andi Syafrani |
| 10. Christina Aryani | 20. Trimedya Panjaitan |

F. Badan Pengawas Pemilu:

1. Abhan
2. Witra Evelin Maduma Sinaga
3. Fiera Maulidda
4. Ghoza Farghani
5. Geanogiovan
6. Agnes Natasia
7. Bella Oktaviani Nurmadon
8. Bella Nathania

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, siang ini kita lanjutkan Sidang untuk Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XVII/2019 dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli dari Termohon.

Sebelumnya, dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir pada sidang siang hari ini. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami memperkenalkan Kuasa Hukum. Saya sendiri T. M. Luthfi Yazid. Kemudian di sebelah kanan saya Iwan Satriawan. Kemudian rekan Iskandar Sonhadji dan rekan Dorel Almir. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Termohon, silakan!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Termohon sudah hadir salah seorang Komisioner KPU RI, Bapak Ilham Saputra. Dari Tim Kuasa Hukum, hadir Ali Nurdin, S.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., Syamsudin Slawat, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., Ridwan Saleh, S.H., Deni Martin, S.H., Mohammad Agus Riza, S.H., Agus Koswara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H.

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Pihak Terkait, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADE IRFAN PULUNGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini kami dari Pihak Terkait, yang hadir dalam persidangan ini, dari sebelah kanan saya, Taufik Basari, I Wayan Sudirta, Trimedya Panjaitan sebagai Pendamping, Prof. Dr. Yuzril Ihza Mahendra sebagai Ketua Tim, saya sendiri Ade Irfan Pulungan, Pak Arsul Sani sebagai Pendamping, Luhut Pangaribuan, Teguh ... maaf, Andi Syafrani, Pasang Haro Rajagukguk, Christophorus Taufik, Erlinda sebagai Pendamping, Teguh Samudera, Christina Aryani, Juri Ardiantoro sebagai Pendamping, Arteria Dahlan sebagai Pendamping, Hermawi Taslim, Ikhsan Abdullah, Fahri Bachmid, Eri Hertiawan, dan M. Iqbal Sumarlan.

Untuk sidang siang hari ini, Juru Bicara kami, yang pertama Prof. Dr. Yuzril Ihza Mahendra. Yang kedua, Luhut Pangaribuan, dan Andi Sayfrani.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Bawaslu, silakan!

8. BAWASLU: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Bawaslu hadir. Saya sendiri Abhan, kemudian dibantu oleh beberapa staf di belakang saya, Witra Sinaga, Bella Nathania, Bella Oktaviani Nurmadon, Agnes Natasia, Geanogiovan, Ghoza Farghani, dan Fiera Maulidda.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Ya. Sebelum kita dengar keterangan Saksi dan Ahli, perlu disampaikan untuk kembali ke tata tertib persidangan, setiap yang keluar masuk ruang sidang atau ada perpindahan tempat duduk, supaya supaya seizin Majelis.

Baik. Termohon ada berapa saksi dan ahli yang akan diajukan?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Termohon, setelah mencermati, melihat perkembangan persidangan, dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan untuk tidak mengajukan saksi, Yang Mulia.

Yang kedua, untuk Ahli, kami mengajukan satu orang Ahli di dalam persidangan, yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, ahli dalam bidang IT, professor pertama IT di Indonesia, dan juga arsitek dari IT di KPU. Dan yang kedua adalah, Bapak Dr. W Riawan Tjandra, itu yang kami ajukan keterangannya dalam bentuk tertulis. Sudah kami masukkan di bawah tadi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Silahkan!

Ahli, disumpah dulu.

Ya, silakan, Prof. Ke depan untuk diambil sumpahnya dulu!

Ya. Silakan, Yang Mulia Prof Pak Wahiddudin untuk memandu persidangan.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Kepada Ahli Termohon, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. Untuk mengikut lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mungkin langsung ke podium.

Silakan Yang Mulia, Pak Wahiddudin.

15. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Silakan ke Ahli untuk menyampaikan keterangannya dan diberikan waktu paling lama 10 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman dari Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Pemohon. Kami persilakan kepada Ahli.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, boleh menyampaikan sesuatu?

Oleh karena Ahli yang dihadirkan hanya 1 orang dan tidak ada saksi, mohon kiranya dapat diberikan waktu yang lebih panjang kepada Ahli ini untuk menerangkan keterangannya. Saya kira akan sebanding dengan apa yang tadi malam ... tadi pagi kita dengar 2 ahli yang diajukan oleh Pihak Pemohon.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya tadi ... tadi malam kan Prof juga mempersoalkan tentang keadilan waktu. Jadi, kita sudah sepakat bahwa untuk pemaparan para ahli ... ahli yang disampaikan para pihak memang ... meskipun memang pada riilnya kemudian berkembang menjadi hampir 20 menit, ya? Ya, nanti Mahkamah akan melihat perkembangan. Artinya, kalau memang bisa ... akan tidak cukup 10 menit, mungkin paling lama 20 menit. Karena memang semalam untuk pemaparan ahlinya Para Pemohon, firm-nya kita beri 10 menit, tapi riilnya memang sampai 20 menit, itu. Jadi, mungkin kita ambil tengah, Prof. Yusril. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, nanti ada toleransi waktu nanti, Prof. Silakan!

21. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi dan Para Hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini.

Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan sesuai dengan kepakaran saya yang saya ketahui tentang Situng yang berapa kali ... yang hari ini dipermasalahkan.

Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa situng itu adalah hanya salah satu dari 19 aplikasi yang ada di dalam portfolio aplikasi sistem informasi pemilu yang dirancang arsitekturnya pada tahun 2003. Pada waktu dirancang dulu dan sama dengan keadaan sekarang, undang-undang menyatakan bahwa yang sah adalah perhitungan suara berjenjang secara manual yang dilakukan mulai dari tingkat TPS sampai

tingkat KPU pusat. Karena itu, pada waktu dirancang, Situng memang tidak dirancang untuk sistem penghitungan suara, tetapi Situng dirancang untuk sarana transporta ... transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap proses-proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang.

Situng ini memiliki sebuah urgensi. Kenapa? Karena keterbukaan akses informasi ini sangat diperlukan agar kontribusi atau partisipasi dari masyarakat sipil ikut mengawal kebenaran dan kejujuran dalam sistem penghitungan suara.

Situng sendiri sebenarnya ada 2 komponen yang mungkin sering dipermasalahkan Situng. Sebetulnya bukan Situng, itu adalah web atau situs dari Situng yang ada di pemilu2019.kpu.co.id. Situng sesungguhnya itu ada di dalam KPU yang hanya bisa diakses dari dalam KPU dan merupakan sistem intranet di dalam KPU, ini waktu dirancang dulu seperti itu.

Nah, sebagian dari informasi dari yang ada di Situng yang ada di dalam ini, kemudian divirtualisasikan, kalau istilah IT-nya itu divirtualisasikan, soalnya dibuat cerminannya yang berupa website Situng yang kita lihat itu, tapi dua ini memiliki karakteristik yang berbeda. Situng yang sesungguhnya hanya bisa akses di ... dari dalam KPU dan diperlengkapi dengan berbagai macam pengamanan termasuk lokasi-lokasi kalau terjadi bencana, misalnya. Kalau tidak salah waktu itu dirancang ada di 3 lokasi, 1 lokasi di KPU, 2 di ... 2 lokasi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun karena merupakan cadangan kalau terjadi suatu bencana atau musibah.

Nah, yang sekarang sering dipermasalahkan adalah yang tampil. Yang tampil itu adalah situs website dari Situng yang merupakan bukan Situngnya sendiri, tetapi cermin atau image dari Situng yang sesungguhnya. Nah, ini adalah gambaran kalau kita ingin melihat sepiantas sistem apa saja yang di dalam KPU mudah-mudahan nanti masih sama, waktu dirancang dulu ada 19 aplikasi di sini. Kita lihat di sana ada garis hitam yang meng ... membatasi kotak yang berwarna agak abu-abu, itu adalah garis batas pengamanan di mana masyarakat tidak bisa masuk ke dalam. Jadi, masyarakat yang bisa diakses adalah bagian yang di sebelah atas dari garis hitam itu yang kotak-kotak yang berwarna putih itu, salah satunya adalah website Situng.

Nah. Karena itu pada setiap kali pemilu. Itu Situng selalu menampilkan disclaimer. Ada yang sekarang ini pada kasus situs atau website Situng yang ada sekarang, itu ada 5 disclaimer-nya. Yang pertama adalah menyatakan bahwa data entri yang ditayangkan pada menu hitung suara yang ada di dalam situs tersebut adalah data yang apa adanya, dimasukkan apa adanya dari Formulir C-1. Apa implikasinya? Kalau di C-1 ada kesalahan, sebagai contoh misalnya saya akan tunjukkan, kesalahan dalam menjumlah total suara kalau dari Form C-1 nya sendiri sudah salah maka di Situng juga akan salah. Kenapa?

Karena para operator Situng itu seperti halnya para operator data entri di mana pun juga, mereka itu biasanya kalau di perusahaan, di perbankan yang banyak saya tahu misalnya, disumpah untuk memasukkan apa yang ada di kertas, mereka tidak boleh merekayasa atau kreatif biarpun tahu yang angka di kertas itu salah, tapi operator data entri hanya boleh memasukkan apa adanya.

Kemudian yang kedua adalah apabila terjadi ... ini disclaimer yang kedua, terjadi perbedaan atau kesalahan pada Formulir C-1, dikoreksinya tidak di Situng, tapi dikoreksinya pada proses penghitungan suara berjenjang, sehingga bisa terjadi bahwa di suara berjenjang sudah dikoreksi suaranya, di Situng dia tidak dikoreksi. Kenapa? Karena memang Situng itu langsung dari C-1 dari TPS dibawa ke KPU daerah kemudian langsung di-upload.

Nah, yang ketiga adalah apabila terjadi perbedaan antara yang ada di situs web dengan di Formulir C-1, maka yang lebih benar adalah yang ada di penghitungan suara berjenjang.

Kemudian yang terakhir adalah KPU menyatakan jumlah per tanggal 21 Mei 2018, jumlah TPS-nya ada 813.350 dan seterusnya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai 1 hal yang sekarang menjadi pembicaraan dimana seolah-olah ada usaha sengaja untuk melakukan perubahan suara di Situng. Mari kita tampilkan data yang saya download. Ini data pada tanggal 25 April 2019, kira-kira seminggu setelah pencoblosan. Kita lihat di tabel ini ternyata suara ... penambahan suara maupun pengurangan suara itu terjadi pada kedua belah pasangan. Jadi, tidak ada spesifik pada 1 pasangan saja, dua-duanya mengalami ada yang menambah, ada yang pengurangan.

Yang kedua adalah dari data ini kalau saya tampilkan plotnya seperti ini untuk level provinsi ini menunjukkan suatu pola yang tidak teratur, pola yang acak. Kalau kita lakukan uji kaiser mungkin bapak, ibu yang memaham ... yang menguasai statistik untuk menguji apakah teratur atau tidak. Uji kaiser menunjukkan bahwa angka-angka ini adalah angka-angka yang sangat acak, tidak ada pola keteraturan sama sekali. Kalau kita perdalam sampai level kabupaten/kota, ini datanya mungkin nanti bisa saya serahkan ada tebal sekali. Kalau kita petakan seperti ini kita lihat lebih acak lagi. Yang merah itu adalah perolehan suara 01, yang biru perolehan suara 02. Jadi, di situ merah ada yang ditambah, tapi ada juga yang berkurang di kabupaten yang lain, biru juga sama demikian.

Nah, sekali lagi di sini juga dari chart atau grafik ini kelihatan sekali bahwa tidak ada pola yang teratur tidak ada, kemudian kalau kita lakukan uji statistik juga sama tidak ada di dalam uji ketidakteraturan dia akan menunjukkan hasil dia adalah angka-angka yang random.

Nah, ini adalah posisi pada tanggal 25 April 2019. Posisi terakhir yang saya bandingkan antara data Situng dengan data dari kawal pemilu. Data kawal pemilu sudah mencapai 96% ... 96,45%, situng pada

waktu itu 97,14% kalau tidak salah, sekitar 97% artinya dua-duanya ini sudah sampai hampir semuanya ... hampir semuanya suara masuk. Ternyata dari dua ini masih ada perbedaan sedikit, perbedaannya adalah pada perolehan suara 01, masih ada perbedaan kira-kira 200 ... di 233 TPS.

Nah, kita lihat kemajuan yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU. Pada tanggal 25 April itu masih ribuan, masalahnya masih ribuan. Tetapi, pada tanggal 10 kemarin ... 10 Juni kemarin, untuk Pasangan Nomor 01 hanya 233 dan melibatkan hanya 12.889 suara.

Pengaruh pada perolehan suara Nomor 02, itu kesalahan entri tadi terjadi di 400 kabupaten/kota ... eh sori, 400 TPS, maaf, Yang Mulia. 400 TPS yang melibatkan suara sebesar 14.990. Jadi, kalau ditotal, Situng per 10 Juni masih ada salah di 233 TPS plus 600 TPS.

Nah, apa saja kesalahannya? Ada 3 jenis kesalahan yang saya periksa satu per satu. Yang pertama adalah ada angkanya, tapi tidak ada citranya. Jadi, hasil pemindaian dari C-1 nya tidak ada, tapi angka entrinya ada. Ini yang paling banyak, hampir kira-kira 40% yang seperti itu, tapi tidak ada pengaruh pada suara. Yang ... yang ada adalah gambar C-1 nya tidak ada, tetapi entri-nya ada.

Yang kedua adalah masalah di data pendukung. Misalnya, penjumlahan antara perolehan Nomor 01 dengan Nomor 02. Nomor 01 misalnya jumlahnya A, Nomor 02=B. Harusnya jumlahnya C, tapi dituliskan D, misalnya.

Nah, ini yang kesalahan yang paling ... yang Nomor 2, kira-kira 30%. Nah, yang sedikit, yang 20% itu hanya yang betul-betul memang terjadi di ... memengaruhi perolehan suara di masing-masing. Tetapi seperti saya tunjukkan tadi, dua-duanya ada yang diuntungkan dan dua-duanya ada yang dirugikan. Saya tidak tahu, mungkin status saat ini mungkin sudah tinggal lebih sedikit lagi karena setiap hari saya melihat data Situng ini selalu diperbaiki, selalu direvisi, dan seterusnya mungkin oleh KPU, sehingga makin lama memang semakin sedikit. Kalau kita bandingkan dari sekitar 5.000 lebih pada bulan ... pada bulan April ... 25 April, sekarang sudah tinggal 600 TPS.

Kemudian, kalau kita tampilkan satu grafik lagi. Ini juga ... gambar ini menunjukkan yang pojok, yang kiri bawah, Yang Mulia. Ini menunjukkan grafik perbandingan perolehan suara Pasangan Nomor 01 dan Nomor 02. Yang merah adalah Nomor 01, yang biru Nomor 02. Kita melihat pada tahap-tahap awal itu memang terjadi persaingan yang ketat. Mereka bahkan pada hari ketiga atau dan kelima itu, kalau tidak salah Pasangan Nomor 02 itu lebih unggul, tetapi data yang masuk baru 0,00% sekian.

Nah, tetapi dengan makin banyak data, kita lihat di sana, di grafik yang di pojok kiri bawah itu makin menunjukkan bahwa selisihnya makin lama makin melebar dan makin jauh.

Jadi, saya juga punya rekaman hari per hari dari website Situng yang ada, yang bisa kita ... yang bisa kita akses.

Enggak bunyi, ya?

22. KETUA: ANWAR USMAN

Petugas!

23. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tes, tes.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Petugas, Petugas! Untuk miknya, ya!

25. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Sudah. Ini adalah peta sebaran suara yang ada di Situng yang sampai dengan Kawal Pemilu. Ya, tidak beda jauh. Jadi, bahkan kalau kita lihat perbedaan suaranya, kalau di Kawal Pemilu dengan status 96,49% dan KPU yang 97,11%, angka akhirnya hampir mirip dengan hasil akhir yang diumumkan oleh KPU kemarin.

Demikian, saya kira, Yang Mulia, keterangan dari saya. Dan selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia untuk berdiskusi.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Terima kasih, Ahli, sudah memanfaatkan waktu persis 12 menit dan tetap di podium. Nanti akan dialami oleh ... pertama, dari Termohon, ya? Ya. 3 Juru Bicaranya diberikan kesempatan.

Kami persilakan, Pak Ali Nurdin.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari kami tidak banyak karena apa yang disampaikan Ahli tadi sudah jelas. Kami ingin menanyakan ke Ahli terkait dengan data dari Kawal Pemilu. Tolong Ahli jelaskan, bagaimana pergerakan Situng terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dibandingkan dengan dari Kawal Pemilu sejak awal? Sejauh mana perbedaannya? Dan apakah dari tampilan ini, terdapat memang arah yang untuk menggerus paslon tertentu, kemudian menyumbang paslon yang lain? Apakah dari data ini ... kan ini kan tidak hanya Situng, ini kan ditampilkan juga

dengan ... dari data Kawal Pemilu yang selama ini merupakan bagian dari partisipasi publik yang sangat dipercaya oleh masyarakat.

Bisa Ahli jelaskan? Silakan!

28. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Baik. Perlu saya sampaikan, pertama bahwa Kawal Pemilu itu adalah inisiatif dari masyarakat, dimana selain mengumpulkan C-1 dari jalur masyarakat. Jadinya kalau dikawal pemilu itu C-1 nya lebih dari 1 karena yang me-upload bisa banyak. Tetapi di sana dilakukan proses verifikasi dan cek, dan baru kemudian di entri, sehingga mungkin dari kualitas entri-nya mungkin, eh ... apa ... lebih valid, ya.

Nah, kalau kita lihat di diagram ini ... di chart ini yang merah di atas itu adalah perolehan suara dari Pasangan 01, dari Situng. Kemudian garis yang ... baris yang kedua yang hijau itu adalah perolehan suara 01, dari Kawal Pemilu. Kemudian yang baris ketiga adalah yang biru itu adalah perolehan suara dari Pasangan 02, dari Kawal Pemilu. Dan yang paling bawah yang berwarna ungu itu adalah perolehan 02 berdasarkan Situng.

Kita lihat memang di awal itu karena Kawal Pemilu ini adalah partisipasi dari publik, maka jumlah data yang masuk tidak secepat dari Situng. Tetapi pada waktu kira-kira menjelang dua per tiga terakhir di sana, kita melihat bahwa kecepatan memasukan data dari Kawal Pemilu mulai menyamai Situng dan hasilnya mulai juga mirip atau mendekati antara dua-duanya itu.

Jadi, kalau kita lihat di sana di Kawal Pemilu itu di awal-awal terjadi data yang berbeda dengan Situng karena memang jumlah data yang di entri itu tidak ... karena memang ini, inisiatif masyarakat sipil yang atas inisiatif sendiri mungkin tidak secepat dari yang ada di Situng yang dilakukan oleh para petugas dari KPU.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Berarti dari tampilan data ini tidak benar, ya? Situng menampilkan data yang menguntungkan salah satu paslon tertentu?

30. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Eh ... saya boleh beropini atau tidak?

31. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Boleh karena Ahli, silakan!

32. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Boleh, ya?

33. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya.

34. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, kalau melihat data ini tidak ada. kenapa?

35. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada, ya?

36. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Karena polanya acak, kecuali kalau polanya tetap di satu tempat, atau di satu provinsi atau di satu kota itu mungkin kita boleh menduga ada upaya-upaya seperti itu. Tetapi ini karena terjadi di ... secara acak, bahkan kalau kita tampilkan per TPS, itu jauh lebih acak lagi.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Jauh lebih acak?

38. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jauh lebih acak lagi. Dimana pasangan, misalnya dimana Pasangan 01 menang, itu di sana juga banyak juga suaranya yang berkurang, menurut C-1 yang di upload. Jadi, sangat acak.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sangat acak, ya?

40. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Sehingga tidak ... menurut saya kalau saya boleh beropini. Jadi, tidak ada ... saya tidak bisa menduga adanya kesengajaan di situ.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik.

42. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Karena semuanya proses ... mungkin hanya kesalahan manusiawi. Kesalahan manusiawi biasa saja.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik.

Apakah Ahli melihat untuk pasangan calon ... untuk data yang ada ini, dari Situng itu, apakah benar ada pengurangan untuk 02 ... seluruhnya pengurangan, begitu?

44. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tidak.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada?

46. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi dua-duanya ada yang ditambah dan dua-duanya ada yang dikurangi. Jadi, seperti kita lihat pada ... ini per provinsi saja, kita lihat yang merah itu adalah suara Pasangan 01 yang biru 02. Di Aceh misalnya, itu terjadi justru lonjakan di Pasangan 02, salah entri-nya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Oh, malah lebih banyak di Aceh, ya?

48. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Malah banyak, misalnya di Aceh (...)

49. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Lebih banyak 02, ya?

50. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Tapi setelah kita lihat beberapa contoh C-1 nya, memang C-1 nya memang banyak yang tidak diisi. Saya tidak tahu tadi di kop ... di coba sebentar, saya cari, tadi dimasukkan ke sini enggak ya file-nya? Saya upload beberapa C-1 dari ... nah, ini Aceh, ya. Aceh ini misalnya kita lihat

citra dari C-1 nya. Ini ... ini paling update ini teman-teman KPU, baru saya akses tadi pagi, Saya download tadi pagi, jadi masih kondisi C-1 nya belum berubah. Ini kalau kita lihat bahwa (...)

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini belum muncul, Ahli, di layar. Tunggu supaya bisa dilihat semua.

52. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya enggak tahu (...)

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tolong IT-nya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Atau enggak apa-apa, Ahli. Ke gambar yang awal saja, Ahli.

55. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Jadi (...)

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Supaya tidak ... mudah itu.

57. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Nah, kita lihat di sini contohnya, pada Formulir C-1 yang dari Aceh ini. Ini ... kita lihat di situ, jumlah pengguna hak pilihnya itu hanya 13. Kan, tidak mungkin ini, ya? Tapi ini terjadi karena memang Form C-1 nya seperti itu. Sementara jumlah pemilihnya ada 295, jumlah pengguna hak pilihnya 13, kemudian jumlah surat suara yang terpakai 244. Jadi, ini bukan kesalahan entri dari petugas, tapi memang data dari C-1 nya seperti ini. Dan inilah yang kemudian menurut saya akan dikoreksi waktu perhitungan suara berjenjang. Tetapi Form C-1 yang ada di Situng, ya, tetap seperti ini. Tidak ... tidak berubah. Karena C-1 yang di upload itu adalah C-1 yang awal betul dari TPS pada waktu selesai pemungutan suara.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Terhadap kesalahan entri yang ada di Situng. Tadi, Ahli, sampaikan bahwa itu akan dikoreksi pada tingkat rekapitulasi berjenjang. Apakah bisa kita menyimpulkan bahwa kalau ada kesalahan Situng, itu merupakan rekayasa untuk penetapan pada rekapitulasi berjenjang sehingga Situng itu dijadikan rujukan agar rekapitulasi berjenjang direkayasa mengikuti Situng? Apakah memungkinkan itu, Ahli?

59. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Sangat sulit. Kenapa? Karena pada Situng ini kan langsung inputnya dari C-1 dari masing-masing TPS, Sementara suara berjenjang itu selain dilakukan secara terbuka, itu melalui jenjang ... melalui dari DA, DB dan seterusnya, ya. Sehingga kalau mau merekayasa, menurut saya sebagai pakar IT, kalau saya mau merekayasa, bukan dari Situng. Yang saya rekayasa adalah perhitungan suara berjenjangnya itu, itupun kalau bisa, gitu ya. Tapi saya kira, akan sangat sulit karena Situng enggak ada gunanya, mau direkayasa, enggak ada gunanya juga, percuma saja.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Satu lagi, Ahli, ini kemarin ada pendapat bahwa Situng itu adalah alat bagian dari rekayasa untuk menempatkan DPT siluman. Jadi, ada DPT yang dianggap bermasalah, ini kemudian bisa dicocokkan masuk ke Situng, kemudian bisa masuk ke rekapitulasi. Bagaimana tanggapan Ahli terkait DPT dengan Situng?

61. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

DPT itu ditangani oleh sistem yang berbeda. Jadi, saya tidak melakukan kajian atau apa pun terhadap sistem yang mengurus DPT. Jadi, saya ... kebetulan karena yang ramai kemarin Situng, jadi ya saya hanya melihat Situng. Jadi, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab soal itu.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, dari kami cukup, Yang Mulia. Tambahan dari rekan kami. Silakan.

63. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Silakan.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Hanya satu pertanyaan saya, terkait dengan keamanan, ya. Menurut Ahli, keamanan ... apa namanya ... Situng atau server KPU itu sejauh mana? Seberapa kuat, begitu? Terima kasih.

65. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Baik. Jadi, kalau kita bicara dunia IT, keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Kalau kita mau nyaman, pasti keamanannya berkurang. Tapi kalau kita mau sangat aman, maka kenyamanannya akan berkurang. Ini, sehingga di dalam implementasi IT, kita harus mempertimbangkan 2 hal itu.

Nah, mari kita lihat pada kasus Situng. Situng yang saya sebut, Situng yang web-nya, situsya ... situs Pemilu 2019 itu ... itu adalah web Situng. Itu pertama dirancang untuk informasi kepada masyarakat untuk sarana transparansi tadi. Dan dia merupakan virtualisasi dari Situng yang sesungguhnya yang ada di dalam. Nah. Karena itu, yang perlu sangat diamankan adalah Situng yang ada di dalam ini. Situng yang ada di dalam ini yang harus diberikan pengamanan yang sangat kuat.

Nah, pengamanan yang dilakukan pertama apa? Yang pertama, dulu pada waktu dirancang, waktu kami dengan teman-teman merancang itu, pertama Situng yang ada di dalam ini hanya bisa diakses dari dalam KPU, tidak bisa diakses dari luar, yang bisa diakses dari luar adalah web-nya itu.

Yang kedua adalah dirancang adanya 3 disaster recovery center, gitu ya, semacam tempat cadangan, yang satu di KPU dan dua di tempat lain. Sehingga kalau terjadi sesuatu, misalnya katakanlah KPU kejatuhan pesawat terbang, begitu ya, masih ada 2 situs yang lain ... yang ... ada 2 server lain yang akan berjalan dan pada ... di salah satu ... jadi, grand design itu ada 6 buku, di buku keenam itu kita kata ... nyatakan bahwa lokasi dari 2 tempat ini tidak boleh diinformasikan pada publik untuk keamanan, sehingga publik mungkin hanya melihat ada di KPU saja, ini yang pertama.

Yang kedua adalah Situng yang situs ini ... situs ... situsya Situng, website-nya Situng. Ini karena untuk transparansi, maka dibuat supaya orang mudah mengakses. Saya dengan mudah mengakses dengan menggunakan Excel saja saya bisa.

Jadi, kalau ada adik saya kemarin cerita bikin robot, enggak perlu robot, itu mahasiswa semester 1 pakai Excel bisa download datanya Situng itu, mudah sekali. Termasuk ini, Form C-1 ini dengan mudah kita bisa download. Karena memang dirancang agar masyarakat bisa dengan

mudah memanfaatkan data tersebut untuk sarana ... untuk ikut mengawal kalau terjadi manipulasi.

Nah, sehingga ... memang sih harus aman website ini, tetapi tidak perlu pengamanannya berlebihan. Dari penilaian saya, cukup-cukup saja, enggak masalah. Kalau ... kenapa? Karena kalau situs web ini merupakan virtualisasi dari data Situng yang sesungguhnya. Kalau situs web ini diretas, atau dirusak, kemarin kan katanya ada hacker Rusia, hacker mana ... ada anak SMP ngerusak, silakan saja, nanti 15 menit lagi di-recover, juga balik lagi seperti semula.

Jadi, tidak ada gunanya kita meretas Situng yang ada di website itu. Jadi, keamanannya menurut saya memadai, cukuplah ... tidak ... tidak sophisticated, tetapi untuk keperluan itu, saya kira untuk balancing antara kenyamanan, balancing antara biaya ... karena kalau kita membuat pengamanan, harus sangat-sangat mahal pengamanannya. Jadi, cukup pengamanannya menurut saya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari belakang, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Masih ada 1 lagi?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Cukup, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya. Selanjutnya, kita berikan kepada Pemohon. Silakan, Pak Luthfi Yazid.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Terima kasih ... ya, terima kasih, Yang Mulia.

Nanti kami akan mengajukan pertanyaan dan setelah saya, mungkin kawan-kawan kami yang lainnya, Kuasa Hukum yang lainnya akan memperdalam, ya baik 3, Yang Mulia ... 3 orang.

Yang pertama, mohon ... terima kasih, Saudara Ahli, mohon dijelaskan kepada kita mengenai expertise dari Saudara Ahli dan juga latar belakang pendidikannya? Terima kasih.

71. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Terima kasih.

Baik, Yang Mulia dan Bapak/Ibu sekalian, saya menamatkan S1 saya dari Departemen Teknik Elektro ITB. Pada waktu itu, Teknik Elektro itu ada 4 jurusan, Arus Kuat, Telekomunikasi, Elektronika, dan yang keempat adalah Jurusan Pengaturan dan Komputer. Saya mengambil Jurusan Pengaturan dan Komputer yang kemudian sekarang terpisah menjadi Program Studi Informatika, itu. Kemudian, saya melanjutkan S2 saya di Australia sebagai ... dalam bidang Ilmu Komputer juga, tahun 1989, saya selesai tahun 1990. Tahun 1990, saya lanjut. Lanjut sampai S3, di bidang Ilmu Komputer dari Curtin University dari Western Australia dari Perth.

Kemudian karena saya mengajar, maka banyak meneliti dan sebagainya, maka pada tahun 2002 dikasih gelar Guru Besar, tapi enggak pakai kepala, ya. Kalau besar kepala, nanti beda, ya. Jadi menjadi Guru Besar pada tahun 2002, di bidang Ilmu Komputer juga.

Nah, di samping saya sebagai akademisi, saya juga banyak berpraktik, saya banyak membangun sistem-sistem informasi yang besar di Indonesia. Salah satunya adalah saya sebagai arsitek dari sistem informasi pemilu yang pada waktu itu ditugaskan pada kami, ada beberapa temen-temen, ada yang dari UI, dari ITB, dari ITS, dari UGM, dan saya sendiri waktu itu, saya ada di Paramadina, merancang sistem informasi pemilu yang ada di bukunya yang namanya *Grand Design Sistem Informasi*.

Karena itu saya sangat menguasai mengenai isinya sistem IT pemilu ini. Nah, karena itulah ... karena saya juga di samping saya akademisi, saya juga berpraktik, maka di belakang ada tambahan gelar, IPU. IPU itu adalah Insinyur Professional Utama. Di PII itu membuat derajat para insinyur praktik, ada yang paling bawah itu namanya pratama, madya, nah saya utama. Berarti kelihatan sudah banyak pengalaman, makanya rambutnya sudah putih, Pak, sudah banyak pengalaman.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar. Kuasa Pemohon, apa sudah menerima CV dari Ahli?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Kami belum menerima. Oleh karena itu, kami juga ingin menanyakan ... tadi ... apa ... barangkali kan, sesuai dengan keahlian Saudara Ahli, ya, barangkali ada publikasi yang terkait dengan yang Saudara jelaskan, misalnya buku atau melalui international journals atau

di Google Scholars atau Saudara sebagai python holder dari ... mohon, barangkali bisa dijelaskan di sini kepada kami. Terima kasih.

74. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Baik. Jadi kalau yang spesifik tentang pemilu dan Situng pasti tidak ada. Tapi sebagai arsitek dari sistem informasi yang arsitek itu adalah ibaratnya kalau rumah itu yang merancang, sebelum nanti dibangun menjadi ini. Banyak sekali publikasi saya, bisa dicek di Google Scholars, di Scopus juga high index saya cukup lumayanlah, ya.

Dan sebagai Guru Besar saya setiap tahun harus membuat publikasi dan membimbing banyak mahasiswa. Saya sudah meluluskan ada kira-kira 22 doktor dan murid saya yang jadi profesor sudah 4. Jadi, sudah ... memang sudah tua saya, ya. Yang sudah profesor sudah 4, tetapi tidak spesifik mengenai pemilu dan Situng, tetapi secara general mengenai bagaimana membangun arsitektur sistem informasi besar, bagaimana pengamanannya. Nah karena itu saya juga banyak membantu pemerintah dari sisi pengamanan atau security dan sebagainya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah mungkin, Saudara Ahli, ada kesalahan entri atau kesalahan dalam Situng ini?

76. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kesalahan entri bisa terjadi, Pak. Jadi, tadi saya sudah tampilkan bahwa kesalahan entri itu ada dan itu tidak hanya terjadi di satu tempat dan tidak hanya terjadi pada satu pasangan. Dua-duanya ada dan tersebar di daerah secara acak.

Jadi, bisa karena kesalahan entri. Karena itu, saya disini kalau boleh beropini, saya tidak menyebut itu kecurangan. Tapi, kesalahan human error biasa saja karena mungkin entri angka itu kan paling melelahkan, Pak. Kalau mengentri tulisan masih bisa kita baca, kalau angka kadang-kadang selip satu digit atau berubah 8 jadi 0 dan sebagainya, itu bisa terjadi, sangat bisa.

Dan tadi sudah saya tampilkan datanya, itu terjadi di semua daerah secara acak dan kemudian meliputi suara 01 maupun 02. Sampai situs terakhir, tanggal 10 Juni pada waktu saya akses kemarin, masih ada di 633 TPS. Yang lainnya, sudah tidak ada masalah.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Jadi, sangat mungkin terjadinya kesalahan entri. Barangkali bisa dicontohkan kepada kami atau ditayangkan kalau ada info grafisnya?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia? Untuk mempersingkat persidangan (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Kami keberatan, Yang Mulia.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hal-hal yang sudah ditanyakan atau sudah dibahas, tidak perlu diulangi karena tadi sudah dijelaskan.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Kami, masih bagian kami, Yang Mulia, untuk bertanya.

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya, berikan kesempatan kepada Pemohon.

83. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, ini contohnya, misalnya diambil ... ambil di ... misalnya Gorontalo lah, ya. Itu di Situng, ditulis 4.451 tetapi setelah dilakukan cek fisik ke C-1 nya, ternyata suara 01=3.811, sehingga ada penambahan suara 640 di 01.

Di tempat yang sama, 02, menurut Situng 4.784, tetapi dicek hanya 4.043. Penambahan suaranya 741.

Jadi artinya di sini, Pasangan 02 penambahannya lebih banyak dibandingkan 01.

Tapi di tempat lain 01 lebih banyak dari 02. Di tempat lain lagi, suara mereka dikurangi. Jadi, itu yang terjadi seperti itu, Pak. Jadi, ada dan itu sampai status, kalau saya lihat status terakhir per 10 Juni itu masih ada di 633 TPS.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Terima kasih. Kemudian, mekanisme atau langkah-langkah apabila yang terjadi kesalahan entri dan lain-lain, seperti apa?

85. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Seperti tadi saya sampaikan pada waktu awal, di-disclaimer itu. Kalau terjadi salah entri karena formulirnya yang salah karena C-1 nya yang salah, seperti contoh tadi salah menjumlah, maka yang dilakukan oleh ... mestinya oleh KPU adalah mengoreksi itu pada waktu perhitungan suara berjenjang.

Nah, kalau C-1 nya sudah dikoreksi baru bisa di KPU dikoreksi lagi, tetapi tidak boleh ... KPU mengoreksi angkanya tanpa mengubah C-1 nya karena nanti terjadi ketidakkonsistenan antara citra atau image dari C-1 dengan angkanya bisa tidak sama.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Kemudian disebutkan tadi disclaimer, ya. Apa itu disclaimer dan kemudian bagaimana menentukan disclaimer itu? Siapa yang menentukan ini harus ada disclaimer dan seperti apa? Apakah itu sepihak saja atau bagaimana? Mohon dijelaskan.

87. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Nah, ini memang salah satu penyakit dari bangsa kita, Pak. Jadi saya juga mungkin memasukkan KPU, lain kali jangan memakai kata *disclaimer*. Banyak orang enggak paham itu disclaimer itu apa, gitu, ya. Jadi disclaimer itu syarat dan ketentuan berlakulah, kira-kira kalau ini, Pak. Siapa yang menentukan? Yang membuat? Yang membuat adalah dari pemilik. Jadi kalau saya menyatakan misalnya ... saya begini, begini, begini, tapi ada disclaimer-nya dengan syarat dan ketentuan begini, begini, begini. Itu memang dari pihak pemilik, dalam hal ini KPU. Tetapi mungkin kalau saya boleh kritik, mbok lain kali jangan pakai kata *disclaimer*, lain kali pakai kata *syarat dan ketentuan* atau *berlaku*, dan sebagainya. Sehingga ... bahasa Indonesialah supaya lebih bisa dipahami oleh semuanya, gitu. Istri saya aja enggak tau disclaimer itu apa sih, padahal istrinya professor.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Ya, terima kasih. Karena begini ... apa namanya ... kita yang pernah kita baca begitu, ya, di dalam ... apa ... disclaimer law itu disebutkan bahwa disclaimer is not enforceable if the other part is not consent to it, gitu. Bagaimana menurut Saudara? Jadi sebaiknya bagaimana disclaimer itu?

89. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, mohon maaf, Pak. Saya ini profesor ilmu computer. Jadi saya enggak memahami hukum. Jadi mungkin Bapak-Bapak yang memahami hukum mungkin bisa itu, tetapi dalam praktik IT selalu normal. Begini, kalau kita install Microsoft Office aja misalnya, di situ ada disclaimer bahwa kalau terjadi kerusakan karena data dan sebagainya, maka Microsoft tidak bertanggung jawab. Jadi praktik yang sangat lazim di dunia software untuk selalu memberikan disclaimer, sehingga membatasi kewajiban dari penyedia software tadi di luar hal-hal yang di luar ... apa ... kekuasaan dia. Nanti sama, Pak, kalau Bapak service HP, misalnya ke tukang service, disclaimer-nya adalah, "Pak kalau datanya hilang enggak tanggung jawab, ya." Bapak harus bilang, "Ya." Karena disclaimer-nya, begitu. Enggak boleh marah nanti kalau datanya hilang karena kalau HP di-repair itu bisa saja terjadi kerusakan data. Itulah disclaimer dalam bidang IT. Kalau di bidang hukum, saya serahkan pada para ahli hukum Yang Mulia yang ada di sini.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: T. M. LUTHFI YAZID

Sementara dari kami sekian dulu. Rekan kami akan melanjutkan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Saudara Ahli, saya ingin mengkonfirmasi 1 hal dulu. Apakah Situng itu adalah bagian dari sistem informasi elektroniknya KPU?

92. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Dia merupakan bagian dari keseluruhan sistem informasi pemilu yang ada di dalam gambar di sini. Betul, dia merupakan salah satu dari 19 portofolio aplikasi yang ada di dalam sistem pemilu kita.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke, tadi Saudara Ahli mengatakan bahwa ... mungkin saya salah memersepsikan, tolong dikonfirmasi. Saudara mengatakan bahwa Situng itu tidak terlalu penting, yang penting itu adalah perhitungan berjenjang. Apakah betul Saudara mengatakan seperti itu?

94. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Dalam konteks hasil, ya. Tapi kalau dalam konteks transparansi atau keterbukaan, Situng penting.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Penting, ya?

96. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Agar masyarakat bisa melihat.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

98. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tadi saya katakan dalam konteks perhitungan hasil suara bahwa seperti yang ada di dalam disclaimer tadi dikatakan bahwa yang diakui sebagai hasil yang sah adalah hasil suara perhitungan suara manual berjenjang yang dilakukan.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, tapi Saudara Ahli setuju ya bahwa Situng itu bagian dari mekanisme kontrol bagaimana sebuah proses penghitungan suara itu bisa diikuti oleh masyarakat dan itu adalah ... the right of the people to access the information?

100. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan untuk mereka mengetahui proses perhitungan suara, tetapi untuk melihat data C-1. Karena itu ... oh, ya, tadi saya ada lupa. Saya ingin menceritakan sejarah dahulu, bagaimana evolusi Situng? Situng pertama kali 2004, itu waktu dibuat hanya untuk menampilkan C-1 saja, tidak ada angkanya. Memang sebetulnya seharusnya hanya seperti itu.

Nah, tetapi kemudian 2009 ... KPU 2009 mungkin melihat banyaknya keinginan masyarakat, masa ya cuma disuruh ditampilkan gambar tadi, kan susah untuk dipahami? Maka dibuatlah angkanya. Waktu itu hanya totalnya saja.

Nah, pada Pemilu 2019 ini KPU yang sekarang mungkin melihat kalau dulu hanya totalnya kan juga masih menyulitkan masyarakat, tetapi akhirnya kemudian dibuatlah angka per TPS-nya juga ditampilkan. Jadi sebetulnya sarana transparansinya itu ada di citra atau scan dari C-1 nya itu, bukan di angka-angkanya itu. Karena yang sah, yang ditandatangani adalah Form C-1 nya, yang dientri itu tidak ada yang menandatangani dan yang bertanggung jawab tidak ada.

101. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke, apakah Saudara Ahli tahu bahwa menurut ketentuan hukum atau Undang-Undang ITE, setiap penyelenggara sistem informasi elektronik, siapapun dia termasuk dalam hal ini lembaga negara seperti KPU, itu berkewajiban untuk menyediakan sistem informasi yang handal, aman, dan bertanggung jawab karena itu adalah pertanggungjawaban kepada publik. Karena kalau tidak, berarti dia menyesatkan publik. Bagaimana menurut Saudara Ahli?

102. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Sekali lagi, saya bukan ahli hukum, jadi mungkin opini saya bisa salah, ya, Pak, ya. Tetapi saya ingat ... saya sampaikan tadi, Situng dengan web Situng, yang kita lihat itu web Situng. Situngnya sendiri sudah memenuhi persyaratan-persyaratan itu.

103. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Tadi kan sudah dikonfirmasi bahwa Situng bagian dari sistem informasi kan sudah klir, ya?

104. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, tetapi website yang muncul itulah hanya publikasi saja. Hanya menyampaikan kepada masyarakat, ini lho, hasil perolehan di masing-masing TPS, dan seterusnya. Jadi, dalam batasan itu, saya kira sudah sangat memenuhi Undang-Undang ITE tersebut karena batasannya adalah sarana untuk menampilkan, ini lho, perolehan suara di TPS kita masing-masing seperti itu. Itu ada di Form C-1, kecuali kalau Form C-1 nya itu dimanipulasi atau C-1 nya diubah. Ketika dilihat jumlahnya salah, kemudian direkayasa supaya benar itu malah justru tidak ... tidak benar. Karena apa? Karena tadi saya ingatkan bahwa ... saya sampaikan tadi bahwa kesalahan terbesar itu adalah karena dari sumber C-1 nya sendiri sudah salah.

105. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Saya cuma memberikan informasi karena itu terkait ... jadi Bapak memang saya apresiasi Bapak memang expertise-nya di bidang IT, tapi sebagai orang hukum kita sedikit mengerti dengan tentang IT law. Jadi, memang tidak bisa kita mengatakan bahwa sistem informasi Situng itu tidak terlalu penting-penting berjenjang.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Keberatan, Yang Mulia.

107. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Apa masalahnya?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Penilaian dari Pemohon bisa disampaikan (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Saya akan melanjutkan ke pertanyaannya (...)

110. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Nanti saya kira (...)

111. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Saya akan lanjut ke pertanyaannya. Menurut hukum sistem informasi itu harus ada jaminan keamanannya, ya, kan? Nah, saya ingin tanyakan kepada Bapak. Bapak sudah berapa lama bekerja di apa ... sebagai apa tadi ... penanggung jawab IT KPU?

112. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya tidak bekerja di KPU dan tidak pernah penanggung jawab KPU, Pak.

113. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Yang mengerjakan Situng sekarang, sistem informasi KPU, Bapak?

114. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Bukan. Yang mengerjakan sistemnya ini, Bapak bukan?

116. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan. Saya yang 2003 dulu merancang arsitekturnya tadi.

117. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oh, Bapak (...)

118. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi ibaratnya rumah itu, sebelum dibangun kan harus ada arsitekturnya, itu bukan saya ... saya saja, tetapi ada teman-teman dari ITB, UI, dan yang lain. Ada 10 orang.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke. Apakah sistem yang sekarang digunakan oleh KPU itu masih yang Bapak buat atau sudah baru?

120. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Arsitekturnya masih sama (...)

121. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Masih sama, ya.

122. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tapi komponennya berubah karena dulu teknologi zaman dulu masih pakai Pentium, gitu, ya, sekarang mungkin sudah enggak ada Pentium lagi, kan. Hanya berubah ... saya mengamati setiap 5 tahun itu KPU selalu ... 5 tahun selalu mengganti perangkat kerasnya, tetapi secara arsitektural tidak beda. Tidak berubah. Jadi kalau rumah, ya, arsitekturnya sama, tetapi sekarang pintunya berubah lebih bagus, jendelanya ganti warna, hanya seperti itu saja.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Bisakah diceritakan kepada kami Saudara Ahli, bagaimana Bapak sebagai perancang sistem informasi IT KPU itu bisa memberikan jaminan kepada kami atau publik ini bahwa sistem itu aman, handal, menutup kemungkinan terjadinya kesalahan karena efeknya sudah serius. Efeknya bisa pidana, ya menurut Undang-Undang ITE. Silakan!

124. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, baik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa arsitektur itu hanya membuat gambar dan kemudian syarat-syarat. Jadi, ada 6 buku di dalam buku grand desain itu, buku ke-6 nya itu bicara mengenai pengamanan, mengenai security. Ada semua standar-standar yang harus diikuti di sana.

Nah, kemudian arsitektur ini, desain ini kemudian diimplementasikan oleh developer, yang membangun. Nah, yang membangun itu bukan kami. Nah, saya tidak tahu apakah yang dibangun itu memenuhi standar itu atau tidak, tetapi saya yakin dengan profesionalisme mereka pasti mereka mengikuti spesifikasi yang ada di dalam arsitektur itu karena arsitektur hanya membuat spesifikasi.

125. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Boleh saya konfirmasi? Bapak tadi mengaku Bapak yang mendesain sistem itu?

126. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Arsitekturnya, ya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Arsitekturnya. Sampai sekarang masih menggunakan arsitektur yang sama?

128. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Arsitekturnya masih.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Pertanyaan saya, lalu siapa yang ... kalau Bapak tadi mengatakan "Saya tidak bertanggungjawab." Siapa yang bisa menjamin atau bertanggungjawab terhadap sistem keamanan sistem informasi itu?

130. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Yang membangun.

131. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Siapa, Pak?

132. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya tidak tahu karena saya bukan kontraktornya. Jadi, ibaratnya rumah, Pak, saya ... ingin saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian mungkin yang agak confuse, ya. Kalau kita mau bikin rumah, itu pertama dibuat arsitekturnya dulu. Setelah arsitekturnya jadi, kita serahkan pada pemborong untuk membangun. Pemborong itulah yang harusnya membangun mengikuti standar-standar yang ada dalam arsitektur itu. Nah, saya arsitekturnya, bukan pemborong yang membangun rumahnya. Kira-kira begitu perumpamaannya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke, kalau begitu nanti kita minta penjelasan dari KPU, siapa yang bertanggung jawab terhadap ... kalau sistem itu tidak ada jaminan keamanannya? Karena Bapak tidak bertanggungjawab. Bapak membuat, tetapi tidak bertanggungjawab.

134. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Pak, sekali lagi ingin saya sampaikan (...)

135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara Pemohon, kan sudah dijelaskan, ini kan ada kelompok-kelompoknya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Beliau itu tadi dikatakan mendesain ... apanya ... membuat rancang bangunnya. Jadi kalau kita bikin rumah itu kan ada yang dari ... dari kertas-kertas itu. Ini, ini, ini, itu kerja beliau.

138. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke.

139. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tetapi tukangnya lain lagi.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

141. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau Anda mau bertanya ke KPU, silakan tanya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke.

143. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Beliau sudah menjelaskan, Ahli sudah menjelaskan ... Saudara Ahli sudah menjelaskan tanggung jawabnya hanya sampai di membuat desain itu.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

145. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah jelaskan (...)

146. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke.

147. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, jangan ditanya lagi yang tidak menjadi tanggung jawabnya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Penjelasan dengan tukang ini lebih mudah saya pahami, ya, contohnya lebih sederhana. Saya bis ... boleh saya lanjutkan?

Ya, oke, saya ... apa ... bisa kami pahami kalau bahwa Bapak hanya mendesain, tapi Bapak tidak bertanggung jawab terhadap sistem keamanannya. Setahu Bapak setelah Bapak desain arsitektur sistem informasi itu, siapa yang mengerjakannya?

149. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya tidak tahu karena saya bukan orang (...)

150. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Keberatan, Yang Mulia. Tadi sudah dijawab oleh Ahli tidak tahu. Kok dipaksakan?

151. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oh, tidak, ya? Saya kan ber ... mengkonfirmasi (...)

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara, Saudara Termohon, sabar juga. Kita nih ada di sini lho, jangan Anda jawab langsung seolah-olah Hakim tidak ada saja di ruang sidang ini (...)

153. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tolong dijaga suasana ... kewibawaan ruang sidang ini.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Yang Mulia.

156. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Yang Mulia, yang ingin kami tegaskan di sini adalah Ahli ini tidak bisa menjawab, ya, dan itu kita hargai bahwa Ahli tidak bertanggung jawab tentang sistem keamanan ... sistem informasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang ITE bahwa sistem itu harus ... dia harus handal, aman, dan bertanggung jawab. Tentu nanti kami punya hak untuk bertanya kepada KPU, siapa yang melanjutkan pekerjaan Ahli ini untuk melakukan proses berikutnya yang bisa menjamin tentang sistem keamanan informasi KPU yang di dalamnya ada Situng. Karena di situlah persoalannya kenapa? Kita sedang berbicara tentang the right of public to access information, tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa that's not important. Itu penting (...)

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara Pemohon, tugas pihak-pihak sebetulnya dalam ruang sidang itu kan membentangkan saja. Nanti kami yang akan menilainya, jadi Anda tidak boleh juga melakukan penilaian, ya. Tugas kami, Hakim, akan membaca semua apa yang akan terbentang di ruang sidang ini. Jadi, jangan kemudian memberikan penilaian juga.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke.

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Bisa saya lanjutkan, Pak? Menurut informasi yang kemarin sudah disampaikan oleh ahli teknologi yang lain, saya kira biasa itu terjadi. Pakar IT yang lain mengatakan bahwa Situng yang ada sekarang itu tidak safe. Ya, saya kira bisa di-refer kepada Professor Soegianto yang kemarin saya ikut sampai subuh. Sis ... Situng ... apa ... Situng sekarang itu tidak safe, dia memberikan kemungkinan kepada faktor eksternal untuk melakukan intervensi. Bagaimana penjelasan dari Pak (...)

161. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, kembali saya ingin sampaikan bahwa Situng dengan website Situng berbeda, kalau itu yang dimaksud itu website Situng mungkin benar. Tapi Situngnya sendiri saya kira tidak seperti itu, Situngnya sendiri tidak bisa diakses sama sekali dari luar. Kita harus masuk ke dalam kantor KPU, harus dari ... terminal yang ada di sana, baru kita bisa mengakses Situng yang ada di sana.

Nah, yang kita lihat itu, Yang Mulia dan Bapak/Ibu sekalian, itu adalah website yang merupakan cerminan. Jadi, sebagian data dari Situng itu divirtualisasikan ke sana. Nah, kalau sistem yang di web ini mau diretas, mau dimasuki, mau dibom juga enggak apa-apa karena apa? 15 menit kemudian akan di-refresh yang baru lagi. Itulah keamanan yang kita buat untuk melindungi keamanan dari website Situng. Kita bisa melakukan apa saja terhadap website Situng, tetapi tidak akan berdampak lama, 15 menit kemudian akan di-refresh dengan data yang semula lagi.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Baik, penjelasannya saya terima. Tapi saya ingin mengkonfrontir kepada Bapak. Ini kan kita bisa belajar juga banyak hal tentang sistem IT. Saya orang hukum tidak banyak tahu, tapi saya ingin belajar lebih jauh. Misalnya begini, keterangan dari ahli sebelumnya mengatakan bahwa dan dia buktikan dengan simulasi di peradilan ini, bagaimana kemudian proses entri data di Situng itu, C-1 nya itu bisa di-interfere dengan editan. Dan itu juga dibuktikan dengan simulasi, saya kira risalahnya masih bisa kita lihat.

Bapak setuju bahwa, ya, entri data di Situng itu bisa diintervensi, Form C-1 yang di-upload itu, bisa adalah hasil Form C-1 yang hasil editan. Apakah sistem informasi itu bisa me-detect bahwa ini formnya tidak benar, tidak valid, sehingga dia ditolak? Bagaimana menurut Bapak?

163. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Begini, Pak, ya. Jadi Form C-1 ini ketika di-upload, itu bukan hanya satu-satunya informasi atau sumber data. Ada saksi-saksi yang juga memegang itu, ada juga situs-situs seperti Nightgreat, dulu ada Jaga TPS, ada Kawal Pemilu, mereka juga me-upload sendiri.

Nah, dari yang saya tampilkan di sini bahwa dengan membandingkan ... dengan membandingkan antara Kawal Pemilu dengan Situng, sekarang baru ... mas ... tinggal masalah ada di 633 TPS. Artinya ... artinya, mungkin bisa saja ada yang meragukan ... melakukan perubahan-perubahan itu, tetapi sudah diganti dengan yang benarnya juga. Jadi, kita tinggal lihat data asli ... hasil akhirnya saja bahwa sekarang masalah hanya tinggal di 213 TPS yang berkaitan dengan 01, dan 400 TPS yang berkaitan dengan 02. Hanya itu saja per tanggal 10 kemarin.

164. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Data kita menunjukkan masih 600, Pak. Eh, 1000 berapa?

165. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Per ... tiap hari berubah, Pak. Karena memang tiap hari direvisi, kan.

166. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Sampai tanggal berapa?

167. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tanggal berapa?

168. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke, baik.

169. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Karena KPU juga melakukan perbaikan, jadi kita tidak bisa debat angka karena setiap hari pasti berubah.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Karena tadi malam itu Ahli IT yang tampil itu dengan sebuah simulasi, ya, tadi Bapak juga membuat statement bahwa sistem itu bisa segera di-refresh kalau terbuat kesalahan, ya. Sekarang saya challenge Bapak untuk bisa memberikan sebuah bukti dan dengan simulasi bahwa itu bisa dilakukan refresh secepat mungkin, sehingga informasi yang salah tidak terlanjur diterima oleh publik. Bisa?

171. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Itu hanya KPU, Pak, yang bisa. Bukan saya, Pak. Saya kan bukan petugas KPU dan pejabat itu KPU, saya tidak bisa lakukan itu.

172. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Berarti Bapak meminta saya untuk men-challenge KPU untuk memberikan itu?

173. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan. Yang saya sampaikan tadi adalah desainnya seperti itu dan saya yakin sampai sekarang masih seperti itu. Karena berapa kali saya menyaksikan sendiri, ketika ada upaya-upaya untuk melakukan peretasan pada Situs Pemilu 2019, itu tidak lama kemudian terjadi dikembalikan lagi semula dan itulah yang oleh beberapa pakar yang saya kemarin dengar pada ... saya nonton sidang di sini, yang dikatakan ada delay. Delay itu sebenarnya ketika terjadi suatu manipulasi, maka sistem ini me-refresh, bukan delay karena ada orang yang mengedit.

174. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Bisa ditunjukkan dengan gambar, Pak? Kami ini bukan ahli IT. Hakim, kami, enggak ... bukan ahli IT. Bisa ditunjukkan dengan gambar bahwa itu delay yang Bapak maksud itu seperti apa?

175. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Begini, kemaren kan ada salah satu statement dari salah satu saksi mengatakan data sudah dientri tapi baru muncul 5 menit kemudian, ya kan? Kenapa tidak instan. Nah, ini adalah karena mungkin pada waktu itu sedang terjadi refresh, mungkin juga karena besarnya data berbeda.

176. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Pak, kita bicara tentang scientific approach, jadi kalau Bapak sering menggunakan kata-kata *mungkin* itu bagaimana saya bisa meyakini apa yang Bapak katakan kalau Bapak terlalu banyak mengatakan kata *mungkin* .

177. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tadi (...)

178. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ini scientific technological approach, dia pasti, jangan banyak menggunakan kata *mungkin* .

179. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Pemohon maaf. Saya ingin meluruskan apa yang ... supaya publik tidak ini juga, ya, tidak bias dengan ... dengan apa yang Saudara tanyakan. Saudara tadi kalau ndak salah menanyakan, apakah itu bisa diperbaiki? Begitu kan awalnya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, betul.

181. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, apakah itu bisa ... Bapak itu bisa.

182. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Benar.

183. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi untuk memperbaiki itu dia tidak bisa mempunyai kewenangan untuk masuk ke situ karena itu adalah dipegang oleh orang yang di KPU. Jadi, kalau Saudara mempersentasikan sekarang, tidak mungkin dong. Gitu, lho.

184. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

185. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

itu ... itu kan?

186. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke.

187. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kecuali kalau Bapak ini adalah operator yang bisa masuk ke web itu, itu bisa. Nah, teknologinya yang diterangkan oleh beliau sekarang ini, kan begitu. Itu yang kalau pemahaman saya. Benar enggak begitu, Saudara Ahli?

188. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul, Yang Mulia. Jadi sebagai (...)

189. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu.

190. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebentar, Bapak. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau begitu, izinkan kami untuk memohon kepada ... karena Bapak ini memang tidak punya tanggung jawab, kami izin (...)

191. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu.

192. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

193. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya juga ingin menyampaikan begini, Bapak ini menerangkan teknologinya, kan begitu? Sementara, teknologi yang diterangkan itu harus memenuhi spesifikasi tertentu sesuai dengan arsitektur yang beliau rancang. Persoalan apakah arsitektur yang beliau rancang dan spesifikasinya itu terpenuhi atau tidak, itu KPU yang tahu. Jadi benar Saudara ketika mau menanyakan kepada KPU. Jadi, jangan ditanggungjawabpukulnya kepada Bapak ini dan tanggung jawab jaminannya itu bagaimana? Kalau beliau kan hanya menjawab formal saja, sepanjang spek yang kami rancang itu dipenuhi, kami jamin itu aman, begitu ya, Pak?

194. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang beliau terangkan. Jadi di luar itu ndak mungkin dong beliau menerangkan atau Saudara mintai pertanggungjawaban.

Demikian, saya cuman mengeklirkan. Jadi, kalau Saudara mau tahu itu lebih banyak, ke ... kepada Termohon menanyakannya. Terima kasih.

196. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan sekarang forumnya Ahli.

197. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oke, terima kasih. Untuk catatannya, nanti saya akan meminta ... kami akan meminta KPU untuk bisa menjelaskan itu nanti.

Baik, saya lanjutkan kepada Saudara Ahli. Ini Bapak ... apa ... mohon maaf nih, Pak, ya, saya harus bertanggung jawab untuk mempertanyakan ini karena ... apa ... kita ingin mencari kebenaran objektifnya.

Pertanyaan saya berikutnya, apakah kalau ... apa ya ... kalau seseorang mendesain sebuah arsitektur sistem informasi itu ada prosedurnya? Misalnya ada jaminan sistem keamanannya, ada auditnya, dan sebagainya?

198. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ada semua.

199. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ada semua?

200. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ada semua. Jadi, memang dalam desain arsitektur itu ada beberapa framework yang bisa kita gunakan, mungkin kalau saya sebutkan namanya mungkin agak asing ada zachman, ada togaf, ada yang lain-lain, itu semua ada standarnya. Dan pada waktu kami merancang dulu itu, semua standar itu dipenuhi, diikuti.

201. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Sudah dipenuhi semua, Pak?

202. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Sudah dipenuhi.

203. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Yang sekarang ini, Bapak terakhir men ... sudah melakukan audit terhadap sistem yang ada sekarang bahwa itu masih fit, gitu?

204. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Pak, maaf, Pak, ya. Saya kan rakyat biasa, saya enggak bisa datang ke KPU ujuk-ujuk audit kan, Pak? Kecuali kalau Majelis Hakim memerintahkan saya audit, ya, saya datang. Lah saya kan enggak punya kewenangan di situ, Pak.

205. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Jadi bapak (...)

206. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi mohon dipahami Bapak, kalau bertanya juga (...)

207. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Pak Iwan, ya. Saya kira Ahli sudah mencoba menjelaskan, tapi ada juga batas-batasnya, ya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, saya paham, Pak. Jadi, saya cuma mengonfirmasi bahwa Bapak ternyata ... berarti Bapak ingin mengatakan bahwa dulu saya yang mendesain, membuat, habis itu saya serahkan ke KPU, saya ndak tahu lagi. Begitu, ya? Benar, Pak, ya?

209. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, sepanjang KPU tidak mengundang saya. Ya, saya tidak bisa ikut campur, Pak. Ini kan proses pemerintah, Pak.

210. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Betul.

211. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya enggak bisa ujuk-ujuk datang ke sana ngoprek-ngoprek servernya beliau, ditangkap polisi saya, Pak.

212. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya ... ya, berarti Bapak sekarang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan sistem informasinya KPU, begitu, kan?

213. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kembali lagi pertanyaannya kan (...)

214. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Arsitekturnya itu beliau bertanggung jawab, Pak. Tapi terpenuhi atau tidaknya itu ... itu KPU yang ini, yang mengisinya. Itu, itu yang tadi sudah saya sampaikan.

215. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pak Iwan, saya kira Mahkamah sudah anggap cukup seperti itu, Pak.

216. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, terima kasih.

217. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, ke yang lainnya.

218. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

219. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Bismillahirrahmaanirrahim. Terima kasih, Majelis yang kami hormati. Langsung saja, Saudara Saksi, ada pertanyaan kami umum ... mulai dulu dengan yang agak lebih umum dulu (...)

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ahli, Ahli bukan saksi.

221. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Saudara Ahli, tadi disampaikan ada perbedaan antara Situng dengan web. Pertanyaan sederhana dulu, yang diumumkan di layar KPU setiap hari itu apakah Situng apakah web?

222. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Itu adalah website, website yang merupakan virtualisasi dari Situng yang sesungguhnya.

223. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Baik, tadi Saudara Ahli mengatakan bahwa tingkat keahlian. Boleh kami verifikasi tingkat keahlian dari Ahli itu sendiri. Dari data kami, kami menemukan dugaan pemilih di bawah umur, yang bernama Obianus Lokobal, Nomor Induk Kependudukan 910205061004**. Bisa enggak

Ahli membuat validasi tentang kebenaran ini? Apakah yang bersangkutan mencoblos atau tidak?

224. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi dengan segala hormat Pak, saya tidak ada kontak atau urusan dengan para pemilih. Yang saya lihat adalah Situng dengan angka-angkanya Pak. Jadi, basisnya mulainya dari C-1, di C-1 itu tidak ada nama-nama siapa nyoblos apa, jadi saya tidak bisa jawab.

225. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Berarti, keahlian dari Ahli tidak sampai me-detect sampai bahwa ini pemilih di bawah umur atau adanya pemilih ganda?

226. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kalau saya ditugaskan, bisa pak. Mudah.

227. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Bagaimana?

228. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya sebagai pakar sekuriti, saya selalu mengatakan sistem apapun bisa saya jebol. Bahkan tadi saya bercanda, saya enggak perlu tanya password-nya wifi-nya MK saya bisa tembus saja, tapi kalau nanti ditangkap para Hakim, kan. Jadi, tapi kan saya tidak ditugaskan untuk itu, Pak.

229. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Kalau kami minta di persidangan ini dengan yang komputer depan Ahli, bisa enggak Saudara Ahli menunjukkan keahlian Saudara mengenai inventarisir orang ini, me-detect orang ini dia di bawah umur atau tidak?

230. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bisa, tapi mungkin makan waktu sampai 2-3 hari Pak karena saya harus bikin programnya, connect ke KPU, minta izin sama, Pak Ketua KPU.

231. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara ... Saudara Pemohon maaf saya luruskan lagi. Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon, hari ini Saksi itu konteks menerangkannya kan bukan untuk menerangkan hal yang demikian. Tapi untuk yang diminta oleh tadi Mahkamah, tadi di summary-nya sudah sampai belum Saudara Pemohon yang di ini?

232. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Belum.

233. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok belum tadi sudah diserahkan saya dengar ... dengan amplop itu, atau Saudara belum baca? Jangan bilang belum dulu!

234. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Oh mohon maaf, belum sampai.

235. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lah itu, sudah disampaikan. Di situ itu hal-hal yang akan diterangkan itu sudah jelas di situ. Jadi, kalau di luar konteks itu tidak mungkin dong Ahli disuruh menerangkan itu.

236. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Baik, dipahami.

237. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah itu, itu yang ... ndak, jangan Saudara ... maksudnya supaya tidak menyimpulkan apa. Kemudian kepada Termohon juga ... apa namanya ... saya juga ingatkan bahwa Ahli ini, itu disuruh untuk menerangkan apa pada hari ini itu kan sudah di ... ditepati apa belum?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sudah, sebagaimana ada dalam keterangan Ahli bahwa (...)

239. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu (...)

240. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Hanya situng saja.

241. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul. Nah, itulah yang ... jadi, fokusnya itu ke situ. Kalau misalnya, nanti ada ahli yang mau diajukan, tapi waktunya sudah ndak ada lagi. Kalau ahli dari ... dari Termohon nanti diminta untuk menerangkan seperti yang diminta oleh Pemohon untuk seperti itu, bisa enggak, misalnya untuk mendeteksi benar ini pemilih palsu atau tidak? Seperti yang Saudara Termohon tanyakan kepada ahli yang diajukan oleh Pemohon, itu ada ahlinya yang seperti itu, kan? Tapi ini kan menerangkan arsitekturnya itu. Jadi, memang hari ini dia tidak bertu ... dia Ahli tidak ditugaskan untuk menerangkan itu Saudara Pemohon. Jadi, maaf saya harus meluruskan ini karena sesuai dengan yang di ... diterangkan dan sudah dibagikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Ahli ini diundang untuk menerangkan apa, itulah yang ... yang harusnya yang menjadi fokus pertanyaan pada hari ini.

242. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Baik, terima kasih Majelis.

243. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Izin Majelis? Termohon.

244. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Nanti saya kira, waktunya, ya ... ke Pemohon dulu, ya. Ya.

245. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Baik terima kasih Majelis, kami lanjutkan. Berdasarkan yang disampaikan oleh Ahli tadi bahwa ada setiap hari data yang diamati oleh Ahli, terakhir tadi dengan data di Aceh tadi. Benar demikian? Yang disampaikan tadi di awal, kami catat ada yang data Nomor 02 bertambah, Nomor 01 bertambah, dan sebaliknya. Kira-kira menurut Ahli, bagaimana itu bisa terjadi?

246. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kembali kalau saya boleh berinterpretasi itu saya kira kesalahan operator pada waktu mengentri atau memang dari Form C-1 nya sudah salah. Nah, ini harus diteliti.

247. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Kalau Form C-1 itu salah, kan tadi dikatakan ada yang ... pe ... perhitungan berjenjang. Kalau Form C-1 salah ... itu salah, sampai seberapa jauh di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi terjadi koreksi perhitungan itu, bagaimana pendapat Anda?

248. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ini maaf, yang Bapak tanyakan yang manual atau yang Situng?

249. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Yang tadi C-1 dulu.

250. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Yang C-1 yang manual?

251. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Manual.

252. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Yang manual, saya tidak mengikuti dan saya tidak tahu karena saya tidak terlibat dalam proses pemilu.

253. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Kalau begitu, bagaimana Saudara Ahli sampai berkesimpulan bahwa ada 600 ... 400 TPS ditambah 233 itu bermasalah?

254. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Itu adalah perbandingan antara Situng dengan Kawal Pemilu. Dimana Kawal Pemilu melalui proses entri yang berbeda. Jadi, ada perbedaan di 623 tadi.

255. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Nah, sekarang kan sudah sampai pada perhitungan lebih-kurang 97% coverage dari perhitungan (...)

256. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Situng.

257. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Situng. Menurut Ahli, berapa total TPS yang bermasalah?

258. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tadi sudah (...)

259. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Apakah sampai ada penambahan atau pengurangan?

260. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tadi sudah saya sampaikan tadi 633.

261. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

633? Nah, menurut Ahli yang telah ditampilkan sebelumnya, itu lebih-kurang 73.000 bermasalah. Nah, kalau terjadi perbedaan yang disparitas yang begitu jauh, bagaimana ini kemungkinan ini yang terjadi?

262. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya sampaikan sekali lagi, ya, Pak. Data itu tiap hari berubah. Jadi, mungkin harus dicek dulu, itu data tanggal berapa? Saya tadi sampaikan pada waktu tanggal 25 April, itu masih ada sekitar 5.000 sekian bermasalah. Jadi, di-download-nya ada tanggalnya di situ, download tanggal berapa. Itu yang membedakan, Pak.

Jadi, setiap hari akan ada penambahan data baru, ada perbaikan, KPU juga melakukan upaya-upaya. Jadi, kalau tidak kita sebutkan tanggalnya, bahkan jamnya, tidak bisa valid. Makanya saya sampaikan tadi, saya download ini pada tanggal 10 Juni, sekarang mungkin sudah berubah.

263. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Ya. Kita kan tahu, semua kan tahu yang setelah diinformasikan di media massa, dan segala macam yang disampaikan oleh KPU, lebih-kurang perhitungannya 55% untuk Nomor 01, 44% sekian untuk Nomor 02. Kalau dibandingkan dengan masalah TPS tadi 73.000 itu bermasalah, 633 juga bermasalah, angka itu sangat jomplang kalau dari persentase hasil tadi. Bagaimana pendapat Ahli menyikapi hal ini?

264. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Sekali lagi, Pak. Boleh saya tahu itu 73.000 itu di tanggal berapa? Kalau tidak ada tanggalnya, enggak bisa kita bandingkan. Saya tanggal 25 April itu ada 5.000. Mungkin dengan bertambahnya, bukan bertambah, tapi kemudian KPU juga melakukan upaya-upaya pasti berkurang juga. Yang jelas, pada per tanggal 10 Juni kemarin tinggal 633.

Terakhir ... statusnya terakhir mungkin nanti bisa ditanya sama KPU. Saya kira, kemarin saya mendengar lebih sedikit lagi, tinggal 200, apa berapa, begitu.

265. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Sementara begitu, Majelis.

266. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Sudah, ya? Berarti Pemohon sudah menggunakan kesempatannya. Sekarang (...)

267. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon izin dulu, Pak ... Pak Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya, silakan!

269. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara ... Saudara Ahli, saya di depan.

270. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

271. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara Ahli, tadi yang konteks Saudara terangkan itu adalah perbandingan antara Situng dengan Kawal Pemilu, ya?

272. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Yang terakhir, tapi yang pertama (...)

273. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang di Kawal Pemilu, kan?

274. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, ya.

275. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan dengan real count yang dihitung secara manual tadi?

276. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan, bukan.

277. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu mesti klir.

278. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan.

279. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang nanti diingat. Jadi, itu dengan Kawal Pemilu yang based on civil society tadi, kan?

280. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

281. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu aktivitas masyarakat, itu yang tadi Saudara Ahli terangkan makin mendekat tadi.

282. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

283. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Bukan dengan real count?

284. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan.

285. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu pertanyaan supaya klir.

286. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

287. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya nanti publik tidak bingung me ... me ... ini ... karena memang tadi Ahli memang sudah menampilkannya di gambar, tapi kan sudah sekian menit yang lalu. Nanti ingatan kita sudah lupa (...)

288. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

289. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bahwa yang dimaksud perbandingan makin mendekat itu adalah antara Situng dengan Kawal Pemilu, itu perbandingannya. Ya, begitu, ya, Saudara Ahli?

290. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Jadi (...)

291. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

292. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kalau yang tanggal 25 April, itu saya bandingkan secara manual. Jadi, saya membandingkan antara data Situng karena datanya enggak banyak, itu dengan C-1 nya. Itu yang tampil akhirnya grafik seperti ini. Ini tanggal 25 April ini manual. Tapi setelah datanya menjadi jutaan, kan enggak mungkin saya lakukan manual. Ya, saya ambil Kawal Pemilu sebagai pembanding saja. Tapi, kalau perhitungan berjenjangnya, saya tidak punya akses.

293. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya, Pihak Terkait untuk 3 Jubirnya. Silakan, Pak Luhut!

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Izin, Majelis. Pertanyaan kami tidak banyak karena sudah cukup banyak tadi yang diterangkan. Saya mulai dulu dengan ada pertanyaan yang berkaitan dengan CV (...)

295. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Maaf, kalau Pak Ahli agak capai, kelamaan, bisa duduk, ya. Silakan, ya.

296. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, enggak apa-apa, Yang Mulia. Saya 60 tahun, tapi masih fit.

297. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya. Alhamdulillah, Pak.

298. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tai Chi. Karena setiap hari itu Tai Chi.

299. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya, ya. Silakan! Terima kasih, Pak.

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Saya mulai ... saya lanjut (...)

301. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Silakan.

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Majelis, berkaitan dengan CV-nya tadi, yang diterangkan tadi selain akademisi, juga praktisi pada saat yang sama. Nah, sebagai akademisi S1, S2, S3 linier, ya. Jadi yang berkaitan dengan IT, betul, ya?

303. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul.

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Dan terakhir sebagai guru besar?

305. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Jadi, saya pernah menjabat Rektor di Paramadina sampai tahun 2005, kemudian menjadi Rektor di Swiss German University sampai 2010. 2010-2018 kemarin, akhir tahun kemarin saya menjadi rektor di Perbanas, tapi sekarang menjadi Guru Besar di Prasetya Mulia dan Bina Dharma.

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi artinya selain akademisi sampai yang paling tinggi itu disebut sebagai guru besar dibidang ... persisnya apa?

307. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Komputer ... Ilmu komputer.

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Ilmu Komputer. Saya pernah dengar namanya Dr. Onno Purbo, itu sama, ya?

309. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Adik kelas saya.

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Oh, adik kelasnya, ya.

311. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Adik kelas saya, tapi pintar dia.

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Oh, adik kelas tapi pintar?

313. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Pintar.

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Dan dia juga sudah sangat terkenal (...)

315. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Apa lagi Bapak barangkali, ya? Apa lagi sudah tampil di sini makin terkenal saya rasanya. Jadi dari segi keilmuan memang (...)

317. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Biar ndak serius-serius, Yang Mulia.

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Dari segi keilmuan linierkan ilmunya, ya? Jadi, konsisten pada bidang yang sama, ya?

319. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Dan kemudian juga menjadi struktural da ... rektor tadi yang disebut itu tadi, karena ada hubungannya dengan apakah menyakinkan atau tidak kan dilihat dari background keilmuannya.

Nah, yang kedua tadi Ahli juga mengatakan praktisi, tadi menyebut PII itu apa?

321. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

IPU. IPU itu insinyur (...)

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Bukan itu gelarnya, kan?

323. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Gelarnya, PII (...)

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Bukan ... Asosiasinya PII, bukan?

325. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Persatuan Insinyur Indonesia.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Ya, kan itu. Jadi, dari PII ada gelarnya IPU?

327. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

IPU.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Itu bisa dijelaskan sedikit? Jadi, inikan sebagai praktisi, kan itu?

329. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Jadi, Persatuan Insinyur Indonesia sesuai dengan undang-undang ke insinyuran, saya lupa nomornya berapa, tapi undang-undang itu berlaku tahun ... dibuat (...)

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Enggak, enggak penting undang-undangnya (...)

331. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Tapi yang pentingkan itu.

333. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Nah, PII itu memberikan sertifikasi kepada para insinyur yang berpraktik. Jadi, bukan hanya insiyur yang ada di kampus yang hanya ... sastrawan teknik, ya. Tetapi betul-betul mempraktikan ilmunya, itu disertifikasi dengan insiyur profesional.

Nah, yang baru biasanya namanya IPP, Instruktur ... Insinyur Professional Pratama, nanti setelah pengalaman 5-10 tahun baru naik ke IPM, Insinyur Professional Madya.

Nah, nanti kalau sudah ... mungkin sudah rambut putih kayak saya ini, ya, udah kasihanlah dikasih namanya IPU, tapi memang dilihat juga portofolio karya-karyanya. Jadi, pekerjaan saya selama ini dinilai di mana saja, pernah melakukan apa saja. Yang bukan di kampus yang betul-betul menerapkan ilmunya, itulah kemudian ada skornya kemudian jadi namanya diberi ... apa ... gelar dibelakangnya namanya IPU.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

IPU itu apa? Singkatan dari apa?

335. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Insinyur Professional Utama.

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Insinyur Professional Utama?

337. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Mungkin setara atau setara dengan guru besar yang di perguruan tinggi, ya?

339. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kalau di akademik gitu.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi, sudah paling tinggi dari semuanya, ya?

341. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Kelihatannya (...)

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Pencapaian, Bapak?

343. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kelihatannya wajahnya (...)

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi, professor sebagai professionalkan?

345. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Professor dan professional lah kira-kira, gitu.

346. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lalu apa yang mau di cari sebenarnya? Cepat, lah itu! Langsung diterangkan sudah itu.

347. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Pertanyaannya apa?

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Hakim ... Yang Mulia, kayak seperti ada yang meragukan padahal kan ini sudah itu ... supaya digarisbawahi begitu bahwa ini bukan ... oke lah, kan begitu.

Baik. Baru ke materinya nih, ini enggak panjang ... ini enggak panjang. Tadi, Ahli sudah menjelaskan. Pertama bukan bagian dari KPU, ya? Tapi yang merancang atau arsitek dari IT, ya? KPU, betul begitu, ya?

349. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi yang diterangkan dalam persidangan ini teknologi yang dirancang sebagai arsiteknya Ahli, yang dipergunakan oleh KPU sampai sekarang tapi bangunannya sudah disesuaikan dengan perkembangan, betul begitu, ya?

351. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul, ya.

352. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Sekalipun bukan atau tidak ... ada ... apa ... bukan bagian dari KPU tapi tetap juga seperti dijelaskan ikut juga mengamati, ya? Perkembangan khususnya yang ada di Situng, betul begitu, ya?

353. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul.

354. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Baik. Tadi Ahli, sudah menjelaskan ada dua tadi yang berkaitan dengan Situng ada di web dan ada satu lagi Situng yang hanya KPU yang tahu. Jadi, dengan kata lain apapun yang terjadi di web-nya ini, itu akan bisa di refresh dalam waktu 15 menit. Betul, begitu?

355. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul, ya.

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

5 menit atau 15 menit?

357. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Periodenya kalau ... dulu waktu dirancang itu tiap 15 menit otomatis refresh.

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Otomatis di refresh-nya itu oleh mesin?

359. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Oleh mesin.

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Ya. Karena ada kesan seolah-olah itu ada kesempatan intervensi dari pihak luar gitu untuk melakukan ... ada pertanyaan yang nanti berikutnya dengan itu. Tapi dari bangunan arsiteknya itu sendiri, itu sudah ada secara otomatis akan di refresh, gitu ya?

361. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Dikembalikan apapun yang terjadi?

363. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Atau intervensi apa yang terjadi?

365. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kalau mau intervensi harus masuk ke gedung KPU, masuk ke ruang server dan koprek-koprek, tapi kalau dari luar tidak bisa.

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Sama sekali dari luar enggak bisa?

367. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Yang bisa di intervensi, ya web-nya saja.

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Oh, web-nya yang saja.

369. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tapi Situngnya tidak bisa.

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi yang dijelaskan orang yang di luar sana, ya, yang mengambil data itu, ya ... dari web itu (...)

371. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Dari web.

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi, itu sesuatu yang tidak valid dong? Antara lain karena akan berubah-ubah, kan begitu? Dan akan diperbaiki oleh sistem, oleh mesinnya?

373. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Karena setiap saat data itu kan bertambah, Pak ... setiap saat ketika KPUD me ... mengirimkan data, ada tambahan data baru. Makanya kan, ada perkembangan persentase data (...)

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Itu salah satu (...)

375. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kemudian yang kedua adalah setiap ada kesalahan, juga pasti dilakukan koreksi. Karena itu, tadi saya sampaikan kepada Pemohon, kita

harus lihat tanggal berapa. Tanggal itu menentukan sekali, berapa persen atau berapa jumlah yang salah.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Nah, ada kaitannya dengan pertanyaan yang terakhir ini. Jadi ... jadi, yang diambil itu yang dari web-nya kan, gitu? (...)

377. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Bukan dari yang hanya KPU tadi yang tahu, yang ketika Ahli membangun. Dan itu di entri C-1 yang berkaitan dengan C-1 yang disebut ada yang edited, gitu (...)

379. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Sehingga ini dibawa ke mana-mana. Seolah menimbulkan itu ada perubahan suara itu. Jadi, C-1 yang sudah di-edited katanya, ya.

Jadi, saya ... pertanyaan saya dulu. Itu yang di web itu, yang sudah di-upload itu C-1 nya, memang bisa diedit oleh ... dari luar?

381. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Di-download dulu, diedit, kemudian dibawa ke mana-mana. Tapi kalau dikembalikan, enggak bisa.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Dikembalikan itu enggak bisa?

383. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Enggak bisa. Karena kalau mau mengembalikan, harus masuk ke KPUD untuk mengupload dari KPUD. Kecuali ada oknum KPUD yang melakukan itu, mengintervensi itu.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa setelah diedit, kemudian dimasukkan lagi ke ... di ... istilahnya ditimpa katanya.

385. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, ditimpa.

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Itu dari segi tekniknya, dari segi teknologinya itu enggak mungkin. Bisa dijelaskan?

387. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, mungkin di web-nya tadi.

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Ya, ya.

389. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kan ada 2. Kalau di web-nya bisa (...)

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Oh, di web-nya itu bisa?

391. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Di web-nya bisa, tetapi kan aslinya tidak akan berubah. Jadi, ketika terjadi refresh, ya, yang ditimpa tadi ya hilang lagi, ditimpa lagi kan.

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Akan hilang lagi (...)

393. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Oh, itulah sebabnya maka tanggal itu kalau mau (...)

395. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, tanggal itu penting (...)

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

itu menjadi penting.

397. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Penting.

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi, memang jadi jawabannya memang itu bisa diedit dan dimasukkan (...)

399. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Di sana. Tapi, itu akan bisa berubah nanti (...)

401. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Sesuai dengan ... apa ... rancangan mesinnya. Kan begitu? Dan yang lebih ... kalau validitasnya itu dengan yang ada di KPU, yang (...)

403. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Yang satu lagi hanya orang KPU yang bisa masuk ke situ, kecuali ada oknum di sana?

405. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ada oknum, ya.

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Jadi, oknum itu harus dibuktikan bahwa dia bisa masuk ke sana. Kan itu?

Nah, kalau oknum itu belum ada dalam persidangan ini.

407. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tapi ingin ... sekali lagi, saya garis bawah ya, Pak, ya. Bahwa yang bisa diedit itu yang di web.

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Ya.

409. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Biar klar nih. Bukan data Situng sesungguhnya. Yang di web itu siapa saja bisa.

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Ya.

411. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Artinya, ya harus punya keahlian, lah ya.

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Betul.

413. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Untuk yang bisa diubah, tetapi yang data aslinya Situng tidak bisa.

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Ya, kalau secara hukum, buat kami, itu ... itu sudah jelas. Jadi, kalau didasarkan ... kesimpulan didasarkan pada data yang tidak valid, ya kesimpulannya tidak valid, gitu kan? Tidak sah, gitu kan? Itu.

Jadi, yang web-nya, itu yang bisa diubah. Sementara yang Situngnya, yang hanya kuncinya dipegang KPU itu tidak akan bisa dimasuki, kecuali ada oknum, gitu ya?

415. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: LUHUT M. P. PANGARIBUAN

Baik. Dari kami ... dari saya cukup, ya. Karena sudah sangat jelas, ya. Terima kasih, Ahli.

417. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Selanjutnya, Saudara Andi Syafrani.

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, saya tadi tertarik dengan istilah virtualisasi yang diulang-ulang sama Ahli. Nah, kalau dalam konteks Situng, tadikan Saudara Ahli menyebutkan, ini beda antara Situng dengan web-nya.

Pertanyaan saya adalah begini, apakah terhadap upaya apa pun untuk mengolah, gitu ya, mengidentifikasi, dan bahkan kemudian akhirnya menyimpulkan kesimpulan dari hal yang sifatnya virtual, bisa Saudara Ahli setuju kita sebut bahwa itu adalah kesimpulan virtual?

419. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya ini profesornya IT, bukan Hukum. Jadi, itu mungkin hukum ya (...)

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Tapi, Saya ingin pendapat ... pendapat ini saja ... pendapat Ahli terkait dengan ... ini segala upaya olahan, segala macam yang ditampilkan terkait dengan Situng, ya kita bisa bilang, ya itu adalah kesimpulan virtual namanya. Karena apa? Karena Situngnya adalah (...)

421. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara ... Saudara (...)

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Karena Situngnya adalah (...)

423. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara Kuasa, jangan dipaksa Ahli (...)

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Ya, nanti saja.

425. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Mengambil kesimpulan sesuai dengan apa yang Saudara pikirkan.

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

427. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi, Ahli ini kan, sudah Ahli betul ini.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Ahli betul ini.

429. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tapi jangan dipaksa, untuk berpendapat sesuai dengan keinginan Saudara, ya!

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Oke. Nah, yang kedua, terkait dengan pola acak. Karena Saya kira ini kata kunci yang penting, gitu ya. Hasil dari temuan yang disampaikan oleh Ahli tadi, dari analisa Ahli bahwa ternyata ditemukan polanya adalah acak, bukan fix pattern, gitu ya?

431. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan, tersistem, ya.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Bukan ... bukan ini sesuatu yang tetap dan mengarah kepada menguntungkan hanya (...)

433. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Salah satu pihak, gitu kan. Itu ... itu kira-kira yang penting menurut kita eksplorasinya. Dasar variabel apa yang meyakinkan Ahli bahwa kesimpulannya adalah kesalahan ini sifatnya teracak?

435. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Pertama, secara visual kita bisa lihat dari grafik tadi, ya. Dari ... dari chart ini, kita bisa lihat, ini pada level kabupaten/kota. Ini tidak menunjukkan adanya sebuah pola tertentu.

Yang kedua, kalau angka itu kita uji dengan tes statistik (...)

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Oke.

437. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Maka menunjukkan bahwa deretan itu, deretan angka acak.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Jadi, uji statistik namanya, ya?

439. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Uji statistik, ya.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Oke. Nah, itu penting saya ... dasarnya adalah dari pengujian statistik.

Kemudian, ini terkait dengan Ahli sebagai akademisi peneliti tadi yang disampaikan, gitu ya. Kalau Kita bikin penelitian, kan biasanya ada variabel yang jelas, gitu kan, ukuran yang jelas, gitu.

Nah, apakah misalnya secara keilmuan, itu dapat dibenarkan, Kita membandingkan 2 hal yang sangat berbeda, antara barang yang hidup dengan barang yang mati, gitu ya. Ini secara keilmuan. Ini ada DPT yang sifatnya potensial, kemudian data ini tiba-tiba dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan sesuatu yang sifatnya aktual karena ada DPT siluman, kemudian kesimpulannya adalah gara-gara DPT siluman, kemudian perolehan suara itu langsung dikurangi dengan mengacu kepada DPT siluman. Nah, secara akademik, secara ilmiah, apakah cara pikir seperti ini, itu bisa dibenarkan?

441. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa saya tidak sama sekali tidak akses kepada data DPT, ya. Jadi saya tidak tahu. Tapi kalau menjawab secara akademik mengenai kasus tadi. Jadi, penelitian itu harus ada sebuah proses yang mengikuti metode ilmiah ya, di mana metode ilmiah itu ada, misalnya variabel ini harus terkait dengan apa, harus ada dulu dibuktikan dulu, baru kemudian bisa dilakukan uji, dan kemudian ditarik kesimpulan.

Nah, selama tidak ada itu, tidak ada bukti adanya korelasi tidak bisa dilakukan penelitian. Nanti kan seperti begini, misalnya gara-gara saya bersaksi di sini hujan turun, oh itu karena saya bersaksi hujan turun. Bahkan enggak hubungannya itu, tapi memang hujan sedang turun, misalnya. Ini contoh yang kadang-kadang dipakai oleh para ... kalau saya kalau mengajar murid saya kadang-kadang yang pakai simple-simple begitu. Jadi, tidak ada korelasi antara saya bersaksi di sini dengan turunnya hujan. Tapi kalau pas di luar hujan turun, ya ndak ada kaitannya. Itu ilmiah itu namanya harus mencari korelasi itu.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI SYAFRANI

Saya kira cukup, Yang Mulia.

443. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Silakan, masih ada satu lagi? Cukup? Ya.
Silakan, dari Hakim.

444. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa dulu? Pak Pal? Ha? Silakan.

Ini Hakim juga apa ... anu harus menjaga etika karena Bapak Pal, memberi kesempatan yang lebih tua. Jadi itu bagian dari ... baik, ya, saya begini. Saya tadi pagi, kalau tidak boleh mengatakan tadi malam, sambil terkantuk-kantuk, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pak Yusril itu. Yang berkaitan dengan digital forensik, nanti Ahli boleh menjelaskan sepanjang itu tahu, meskipun tidak dalam klaster apa yang disampaikan oleh Termohon, artinya kan Anda juga bisa, sepanjang itu tahu karena sudah dibawah sumpah. Kemudian, jangan kemudian dibatasi pada ini kan ini saya kontraknya dengan Termohon hanya untuk menjelaskan ini. Ada sesuatu, kemudian yang Anda bisa sembunyikan.

Begini, tetapi sebelumnya saya minta konfirmasi dulu kepada Kuasa Termohon, ya, Pak Ali?

445. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, Yang Mulia.

446. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang disampaikan Pak Yusril tadi malam itu, bisa kemudian menjadi sesuatu yang menarik. Apakah selama ini, ini kan datangnya tidak tiba-tiba ini, persoalan tentang adanya bukti pembandingan soal perolehan suara. Terlepas itu basisnya Situnglah atau perhitungan berjenjang yang masing-masing mempunyai versi itu, apakah dari secara kelembagaan dari Termohon sendiri sudah pernah mengambil langkah-langkah untuk menguji itu? Pernah, tidak? Atau belum?

447. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Menguji apa, Yang Mulia?

448. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya menguji adanya dugaan bahwa ini ada 2 data menurut Termohon selaku penyelenggara yang diberi kewenangan oleh itu secara sah oleh undang-undang dengan yang dida ... data yang di-compare oleh Pihak Pemohon?

449. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, kalau (...)

450. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau mungkin juga ada pihak ketiga yang mungkin secara viral tidak muncul.

451. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kalau setahu kami sumber data itu 1, Yang Mulia, dari TPS berupa C-1. Yang dibawa ke (...)

452. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan itu pertanyaannya, Pak Ali.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya.

454. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda sudah pernah melakukan itu belum? Seperti yang disampaikan kepada Pak Yusril tadi malam, disalurkan kepada lembaga yang berwenang itu?

455. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kalau untuk ini kami sampaikan kepada Prinsipal untuk menjawabnya, Yang Mulia.

456. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan!

457. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.

458. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

459. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Jadi, untuk Situng ini sebagaimana disampaikan oleh Ahli dan sebagaimana diketahui, yang namanya upload data C-1, itu kan apa

adanya, sehingga walaupun ada kesalahan tulis, ya pasti akan tahu siapa itu.

460. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kami tahu, Pak ... Pak Hasyim.

461. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya.

462. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, sebenarnya pertanyaan saya bukan pada posisi itu. Apa yang sudah Anda kerjakan itu sekarang di-challenge orang?

463. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya.

464. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini ada bukti lho seperti ini. Ada tidak, ada usaha dari lembaga Anda untuk mengambil bukti itu, kemudian dilakukan pengujian? Esensinya di sana pertanyaan saya.

465. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Untuk yang daftar ini untuk daftar pemilih atau Situng? Kalau daftar pemilih sudah berkali-kali diuji.

466. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Daftar yang dijadikan data penghitungan.

467. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Baik. Kalau Situng kalau di ... ada kesalahan seperti itu, kami bisa melacak siapa sesungguhnya yang mengentri ini? Siapa yang ini?

468. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya.

469. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ini sebagai salah satu upaya.

470. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah. Yang saya tanya bukan itu sebenarnya, tapi sudah beberapa kali saya mengingatkan. Kalau begitu saya tanya kepada pihak sebaliknya, Pemohon.

Apakah juga data-data yang kemudian oleh Ahli tadi malam, Ahli Saudara itu dijadikan rujukan untuk melakukan penghitungan yang kemudian menjadi selisih yang signifikan berbeda antara yang dilakukan oleh KPU dengan dari Pihak Bapak itu, Pak Iwan? Sudah pernah dilakukan pengujian bahwa data saya ini sebenarnya secara kelembagaan. Pejabat yang berwenang mengatakan bahwa ini adalah yang legal. Pernah dilakukan tidak? Sebenarnya pertanyaan itu sudah diatur belum? Ya atau tidak sebenarnya per ... jawabannya itu.

471. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya. Kalau kami dari Pemohon, kami percaya dengan pembuktian secara scientific yang disampaikan oleh Ahli.

472. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan semalam di-challenge Pak Yusril itu.

473. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Betul.

474. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya Mahkamah perlu kemudian mendalami hal ini. Sudah pernah atau belum? Ya atau tidak? Pernah dilakukan untuk dimintakan kepada lembaga yang berwenang? Bahkan Pak Yusril menyusul ... sampai kepada ini harus dibuktikan kepada lembaga peradilan. Artinya, memang setelah saya pelajari dalam ... dalam tataran yang ... dalam media yang sederhana tadi karena saya juga terus tidur dan waktunya tidak terlalu banyak. Ada beberapa metode? Satu, kloning, identifikasi, analisa, dan kemudian pelaporan. Pelaporan itu yang kemudian bisa sampai kepada pembuktian di peradilan. Apakah ada Para Pihak Pemohon dan Termohon pernah melakukan itu? Itu pertanyaan dasar saya, kemudian akan saya rujuk kepada ... untuk menanyakan kepada Ahli, Pak ... Pak Iwan.

475. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, mohon izin, kami jelaskan, Pak Yang Mulia. Kalau pertanyaan itu ditanyakan bahwa apakah kami pernah mengujinya secara kelembagaan tertentu? Tidak pernah.

476. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak pernah. Cukup.

477. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Tapi kami percaya bahwa dengan (...)

478. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu argumen lain yang sudah Anda sampaikan, ya (...)

479. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, dengan background CV-nya, gitu, seperti juga disampaikan (...)

480. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kami hormati itu argumen itu, tapi (...)

481. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Seperti yang disampaikan ... seperti saya sampaikan tadi bahwa Pihak KPU juga percaya dan juga Pihak Terkait sepertinya juga percaya, gitu, kompak, gitu, kepada expertise ... expertise-nya Pak Profesor. Jadi saya juga ... di tingkat tertentu saya juga percaya, cuma tadi mungkin ada pertanyaan saya yang mungkin tidak bisa dijawab (...)

482. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

483. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Oleh Profesor karena itu bukan bidangnya beliau (...)

484. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

485. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Jadi kalau kita ... kita trust dengan expertise dari Profesor yang kita jadikan (...)

486. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ... kalau itu sudah Anda beberkan dalam argumen-argumen yang selebihnya, tapi untuk konteks yang saya tanyakan kan tidak. KPU tidak secara tegas mengatakan seperti itu, selalu ngeles-ngeles.

487. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

488. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak apa-apa.

489. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Begini, Saudara Ahli, apakah kemudian kalau muncul secara faktual ada data Situng yang memang berbeda, kalau Bapak tahu ini ... Pak Ahli ini, sebenarnya apakah sesungguhnya data Situng itu bisa kemudian ... baik itu diambil oleh secara internal karena itu yang bisa mengakses kan hanya KPU, tapi juga tidak tertutup kemungkinan melalui web yang di luar itu, hanya harus memang mempunyai keahlian khusus. Dimungkinkan tidak itu, Pak, kemudian memang muncul Situng yang sebenarnya itu merupakan bagian yang dikeluarkan ... dikeluarkan oleh KPU secara resmi, tapi karena bisa diakses melalui web, kemudian dilakukan reka ... rekayasa-rekayasa yang kemudian ... tapi saya tidak mengatakan bahwa ada yang merekayasa, tapi secara faktual ada data yang berbeda di dalam Situng itu? Nanti selanjutnya Mahkamah akan menilai tentang mana sebenarnya ... sesungguhnya yang ... karena ada bukti yang ... yang asli, ada juga yang hanya fotokopi ... fotokopi dan difotokopi. Sebenarnya bisa tidak, Pak, kemudian direkayasa demikian rupa, sehingga itu kemudian seolah-olah menjadi hasil upload-an dari

Situng yang kemudian seolah-olah menjadi asli, secara keilmu ... keilmuan maupun secara teknis, Pak?

491. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Baik, Yang Mulia. Pertama saya mulai dulu dari digital forensik yang Yang Mulia sebutkan, ya?

492. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

493. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Digital forensik itu pada dasarnya adalah mengaudit sebuah sistem untuk menemukan apakah di sana ada jejak-jejak fraud di sana (...)

494. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kecurangan, palsu, atau tidak kan?

495. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kecurangan, palsu, dan sebagainya itu namanya ... dan dilakukan oleh namanya information system auditor, ada profesi khusus untuk itu. Itu yang melakukan audit terhadap proses itu.

Nah, tetapi yang dikaitkan dengan apa yang ... Yang Mulia sampaikan kalau ada lebih dari 1 data yang berbeda, berarti salah satunya pasti salah, ya, kan? Karena berbeda. Berarti salah satunya salah. Nah, untuk membuktikan mana yang salah, mana yang benar, ini kan kita harus punya norma, punya standar. Nah, di dalam kasus yang pertama saya ... menurut pendapat saya misalnya, karena kita tidak tahu yang di Situng itu benar apa salah, yang di Kawal Pemilu salah atau benar, kita match-kan saja, kalau dua-duanya cocok, ya, kira-kira kemungkinan besar benar. Tetapi yang paling valid lagi adalah sebetulnya (...)

496. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau cocok, Pak Ahli, tidak ada persoalan.

497. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, kan sekarang antara Situng dengan Kawal Pemilu hampir 99,9% cocok, gitu. Tapi mungkin dengan data yang lain yang beredar di media sosial berbeda.

498. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

499. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Nah, jadi kita bandingkan ... seperti yang saya lakukan tadi, saya bandingkan saja dengan Kawal Pemilu, gitu. Lihat bedanya jauh atau tidak? Kalau bedanya sangat jauh berarti mungkin, ya, dua-duanya salah. Tapi kalau bedanya hanya 0,05, saya kira dalam statistik itu range yang bisa diterima.

500. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa Anda bisa memastikan kalau berbeda jauh itu pasti kemudian itu dua-duanya bisa ada persoalan?

501. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ada kemungkinan di salah satunya pasti ... pasti salah.

502. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anda sekarang mengatakan, "Kemungkinan."

503. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

504. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tadi kan tidak mau menggunakan kemungkinan, berarti dua-duanya salah?

505. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kalau bedanya besar (...)

506. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang tegas, Pak.

507. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, kalau bedanya besar, maka kemungkinan salahnya antara kedua-dua probabilitasnya juga makin besar (...)

508. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makin besar.

509. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi ... kita bicara probabilitas, Yang Mulia, ya. Jadi, kalau 2 data bedanya sedikit, maka probabilitas dua-duanya salah itu kecil.

510. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau begitu, apakah kemudian kalau ada perbedaan secara disparitas itu jauh, antara yang satu dengan yang satunya jauh, dan antara satu dengan yang satunya dekat, apa kemudian itu tidak bisa serta merta dikatakan bahwa itu ada salah satu yang kemudian Anda katakan tidak benar? Kalau boleh, kita menghindari kata palsu.

511. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Di dalam ilmu data, itu ada namanya voting. Jadi, kalau ... seperti demokrasi saja. Kalau, 3 tadi yang 2 mirip-mirip, yang satu beda, berarti kemungkinan besar probabilitasnya adalah yang berbeda ini yang ... yang mempunyai kemudian besar salah.

Nah, tapi saya ingin sebetulnya menyampaikan solusi yang kedua. Kalau, kita mau cek data Situng benar apa salah, kita bandingkan saja dengan perhitungan data manual. Berbeda atau tidak? Kalau, tidak banyak berbeda, ya mungkin berbeda hanya 0,0% ... tergantung probabilitasnya, maka kita bisa katakan bahwa ... data yang ada di Situng itu adalah data benar karena dibandingkan ... yang karena secara legal, yang kita akui kan yang data manual ini, yang kita ketahui secara legal, sehingga kita jadikan dia (...)

512. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya tidak menggiring Bapak untuk menilai salah satu, kalau kemudian kan sudah ada ... ada tendensiusnya ... kalau kemudian ...

karena ini KPU sudah legal, kemudian benar ... tidak itu yang ingin saya dapatkan. Bahwa ketika ada 2 bukti yang bisa menjadi diperbandingkan, baik secara range itu berbedanya jauh maupun dekat, apakah itu serta merta bisa dikatakan kemudian, dua-duanya, kemudian tidak benar, ataukah salah satu yang tidak benar? Cukup salah satu yang tidak benar.

513. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya. Saya ingin me ... me ... menjawab yang pertama dulu tadi Pak ... Yang Mulia, ya bahwa ... saya menyampaikan bahwa yang KPU benar itu kan secara hukum, secara undang-undang (...)

514. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Karena (...)

515. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Yang diakui yang manual itu, ya. Jadi, secara undang-undang saja karena kalau ... kalau secara benar apa salah secara faktual kan kita tidak tahu, tetapi secara hukum itulah yang dianggap benar. Secara hukum (...)

516. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan selanjutnya, Bapak, bagaimana kemudian untuk menen ... untuk menyikapi ketika ada 2 data yang berbeda itu? Kalau, tanpa kemudian harus selalu melekat karena KPU adalah pejabat yang berwenang, atau lembaga yang berwenang, kemudian selalu ada tendensi bahwa itu yang benar. Coba kita lepaskan baju itu dulu. Kalau dari sisi pandang Anda sebagai Ahli kalau bisa berikan, apa kira-kira ... apa ... parameterinya? Tapi kalau tidak ... juga tidak usah dipaksakan.

517. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ada beberapa metode statistik yang bisa digunakan untuk itu.

518. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

519. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Untuk melihat, misalnya kita punya 2 data, katakanlah, kita lepaskan mana yang legal atau tidak legal kita punya 2 data yang

berbeda, maka kita bisa lakukan uji statistik kira-kira pasangan data ... apa ... deretan data mana yang memiliki probabilitas lebih benar dibandingkan yang lain. Ada banyak uji statistik di sana bisa dipakai, T-Test ... macam-macam, Yang Mulia.

Saya tidak pakar di statistik, tapi mungkin di data statistik ada (...)

520. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu salah satu metode yang bisa dipakai (...)

521. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

522. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah kalau begitu. Saya tinggal itu. Saya pertanyaan berikutnya begini, apakah bisa menurut ... menurut keahlian Saudara ... Saudara Ahli, Pak, kalau akan menentukan bahwa secara akumulasi atau paling tidak secara signifikansi bahwa perolehan sebuah ... perolehan akumulasi suara itu hanya didasarkan pada random yang sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah yang sesungguhnya. Bisa tidak? Random-nya itu sebenarnya tidak kemudian berbanding lurus atau ... kita kan kalau berbanding lurus namanya kan satu-satu, ya. Artinya, persentasenya jauh ... cukup jauh. Bisa tidak? Kemudian bisa diperoleh hasil akumulasi yang akurat menurut keahlian Saudara?

523. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Kembali Yang Mulia, akurasi itu kan punya nilai, punya angka, probabilitas akurasi berapa persen (...)

524. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

525. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi, kalau kita buat akurasinya 0,05 misalnya, maka kalau di luar range itu menjadi ... dianggap tidak signifikan.

526. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

527. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tapi, kalau akurasinya kita buat ... misalnya, akurasinya kita buat 15%, maka beda suara 15%, ya, dianggap bisa sama (...)

528. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang (...)

529. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Makanya tergantung derajat akurasi yang mau kita tetapkan berapa.

530. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang kewajaran yang kemudian bisa ditolerir sampai berapa persen sih, Pak? Margin error itu.

531. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

0,05 atau 5%.

532. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Margin error itu?

533. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Margin of error. Yang rata-rata, ya.

534. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian begini, itu sudah tadi secara random. Kemudian ... mungkin itu dulu saya. Pak Ketua, nanti saya tambah lagi. Saya ... tapi masih ada ganjelan. Saya ada pertanyaan yang belum saya sampaikan, tapi akan saya formulakan kembali. Terima kasih.

535. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Silakan, Pak Palguna!

536. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya cuma memastikan tadi ... apa namanya ... agak terganggu dalam pikiran saya, antara kemungkinan perbedaan antara Situng yang sesungguhnya dengan citranya. Ya, Pak, ya? Citranya itu. Yang nanti kalau ... citranya ini bisa diganggu-ganggu, ya, Pak, ya? Bisa diganggu-ganggu. tetapi nanti akan di-update sendiri, begitu, ya?

Nah, sementara tadi mengatakan bahwa Situng itu tidak mungkin, kecuali dilakukan oleh petugas yang menginput itu sendiri.

Nah, dengan demikian berarti dalil bahwa data yang di Situng yang sesungguhnya itu, itu tidak valid ... tidak valid, hanya mungkin terjadi apabila terbukti ada pengentri yang ternyata mengedit data itu, begitu Pak, ya?

537. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

538. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul?

539. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul.

540. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, pertanyaan sekarang, saya kepada KPU dan Bawaslu. Apakah selama penyelenggaraan pemilu ini pernah terjadi perkara pidana di mana seseorang telah dituduh atau didakwa melakukan perbuatan pidana mengedit data C-1 yang di-entry untuk ke Situng itu?

541. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Di KPU tidak ada.

542. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada?

Dalam laporan Bawaslu, apakah itu ada?

543. BAWASLU: ABHAN

Tidak ada juga.

544. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Kemudian, berikutnya yang mau saya tanyakan begini. Pak ... hanya 2 pertanyaan sebenarnya ... Pak ... Saudara Ahli, secara statistik berapa persentase tingkat reliabilitas yang bisa diterima, antara ... apa namanya ... antara angka yang ada di Situng itu dengan yang di real count secara manual karena ada perbedaan. Ada ndak ininya, Pak?

545. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tidak ada standarnya, Yang Mulia. Jadi, kalau tergantung kita mau tingkat kepercayaan 5%, mau tingkat kepercayaan 2%, mau tingkat kepercayaan berapa, itulah yang namanya tingkat kepercayaannya kita tentukan karena statistik itu kan (...)

546. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

547. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Suatu yang berdasarkan seberapa derajat kita mau percaya.

548. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, pada akhirnya Situng yang sesungguhnya, ini saya tidak berbicara citranya. Situng yang sesungguhnya itu pada akhirnya angkanya akan klop dengan penghitungan manual?

549. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Harus.

550. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Harus klop?

551. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Harusnya.

552. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau tidak klop berarti di situ ada masalah?

553. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ada masalah.

554. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi masalah yang timbul itu bukan karena gangguan pada citra itu?

555. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bukan.

556. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi gangguan pada Situngnya sendiri?

557. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Gangguan?

558. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dan itu hanya dilakukan oleh si pengentri kalau itu terjadi?

559. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bisa.

560. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi bisa enggak itu disusup-susup secara ... walaupun tadi Pak Luhut sudah nanya itu, enggak bisa disusup-susup dari luar enggak itu kalau orang masuk ke situ?

561. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya ini karena bukan intel jadi enggak tahu. Mungkin bisa saja, Yang Mulia. (...)

562. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, secara teknologi?

563. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bisa sajalah.

564. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Secara teknologi?

565. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Tapi, orangnya harus masuk ke sana.

566. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, orangnya harus masuk ke situ?

567. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Jadi, pura-pura bertamu ke KPU begitu kan, bisa saja mungkin temannya Pak Ketua, terus masuk-masuk ruangan, bisa saja. Tapi, kemungkinan saya kira pengamanan (...)

568. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kira-kira seperti pepatah lamalah (...)

569. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

570. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi tembok Cina itu begitu kuatnya, tidak mungkin diruntuhkan kecuali dengan menyuap penjaganya, begitu?

571. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO HAKIM

Ya, betul.

572. ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ya jadi, artinya (...)

573. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, Yang Mulia.

574. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Petugas entrinya yang mesti di ini (...)

575. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

576. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, poin Bapak mau menyampaikan itu, ya? Baik, terima kasih.
Jadi, itu yang sudah ... sebenarnya yang lain sudah ditanyakan,
jadi saya ndak perlu ulang-ulang lagi, terima kasih.
Terima kasih, Pak Wahiddudin.

577. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Baik, dari Hakim tidak ada lagi?
Silakan, Pak Prof. Aswanto!

578. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin meminta penegasan
beberapa hal kepada Prof. sebagai Ahli.

579. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, Yang Mulia.

580. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tapi, sebelumnya saya minta teman-teman KPU untuk mengoreksi
kalau ada hal yang keliru yang saya sampaikan.
Mekanisme perhitungan suara dan rekap suara itu kan kalau kita
lihat norma dalam Undang-Undang Pemilu, itu dimulai dari kertas suara
yang dicoblos, lalu kemudian kertas suara yang dicoblos itu (...)

581. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, istilahnya surat suara.

582. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, surat suara yang dicoblos itu, itu kemudian untuk menghitung dan mengetahui berapa dan siapa yang memperoleh suara, itu dituangkan kedalam C-1 Plano?

583. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, yang Mulia.

584. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul, ya?

585. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul.

586. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lalu kemudian, C-1 Plano itu dituangkan kembali kedalam C-1 berhologram?

587. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, C-1 PPWP untuk presiden.

588. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke. Itu agak susah ... kami sudah belajar nama-nama form-nya, tapi agak susah itu.

Nah, pada tingkat itu, melalui bantuan KPPS. C-1 Plano yang sudah ditempatkan di dalam tempat yang sesuai dengan aturan itu dikumpul, di ... dibawa ke PPK untuk direkap?

589. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Jadi, dimasukkan kedalam kotak.

590. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul, betul.

591. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

C-1 itu ada yang asli berhologram, kemudian ada salinannya.

592. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul.

593. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Untuk yang asli berhologram, masuk kedalam kotak. Untuk yang salinannya ini yang dibawa ke (...)

594. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

KPU?

595. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

KPU untuk di-scan (...)

596. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kabupaten?

597. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya.

598. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, itu yang mau saya tanyakan. Jadi, yang fotokopian dari C-1 ber ... C-1 berhologram tadi, kalau yang asli itu dibawa ke PPK untuk kemudian direkap di sana kembali?

599. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul.

600. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dan yang fotokopiannya, itu salinannya ... ya ini istilahnya yang beda, ya. Yang salinannya, itu dikirim ke KPU kabupaten?

601. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia. Ini saya (...)

602. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

KPU kabupatenlah yang langsung melakukan entri data itu ke Situng?

603. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, ada operator, ada verifikatornya di tingkat Kabupaten.

604. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, yang ... yang ... yang apa ... yang punya tanggung jawab untuk melakukan entri itu adalah KPU tingkat kabupaten?

605. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul.

606. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Atau kota?

607. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik untuk entri maupun untuk koreksi ada pada KPU kabupaten/kota.

608. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik.

Nah, dengan demikian, sebenarnya Situng itu ... jadi, situng itu digunakan ... digunakan setelah ada penghitungan suara di tingkat TPS.

609. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul.

610. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul, ya? Nah, ini juga perlu klarifikasi teman-teman KPU. Apakah rekapitulasi yang berjenjang itu atau penghitungan yang berjenjang itu, fungsinya semata-mata untuk mengetahui perolehan suara dan siapa yang memperoleh suara atau juga sekaligus sebagai sarana untuk melakukan koreksi?

611. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, sama. Karena di dalam form ... yang semula kan diisi itu di C-1, di C-1 itu berisi 4 info. Pertama, data pemilih, DPT, DPTb, dan DPK. Kedua, data pengguna hak pilih, DPT, DPTb, DPK. Yang ketiga, data tentang surat suara, berapa surat suara yang digunakan dan lain-lain, serta data perolehan suara.

612. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Jadi, kes (...)

613. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Nah, daripada tingkat kecamatan, kalau ada kesalahan dicek lagi untuk tingkat kecamatan.

614. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke, oke. Itu yang saya ingin apa ... ketegasan. Jadi, sebenarnya rekap yang berjenjang itu PPK kabupaten, provinsi, dan pusat nasional, itu selain bertujuan untuk mengetahui perolehan dan siapa yang memperoleh suara, juga sebagai sarana untuk melakukan koreksi, kalau ternyata ada kekeliruan-kekeliruan, baik yang disampaikan oleh para peserta pemilu ataupun yang ditemukan sendiri oleh penyelenggara?

615. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul. Karena waktu di tingkat kecamatan, walaupun rekap namanya tingkat kecamatan, tapi untuk yang pertama adalah tingkat desa dulu.

616. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik.

617. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tingkat desa itu berangkat dari berbagai TPS. Di situ dicek ulang lagi, apakah ada kesalahan atau ketidakcocokan mengenai data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara, dan perolehan suara. Jika ada yang tidak cocok, maka lakun ... langsung dilakukan koreksi.

618. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik.

619. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Koreksi atau pencatatan atau rekapnya itu adalah Formulir Model DAA-1.

620. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu, itu klir, Pak ... Pak Nurdin, klir itu. Jadi, poin yang penting di situ adalah salah satu fungsinya rekap itu adalah sarana untuk melakukan koreksi. Betul, ya?

621. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia. Karena di situ hadir Bawaslu dan semua peserta pemilu.

622. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Yang saya ingin klarifikasi atau penegasan kepada Prof sebagai Ahli, kalau yang di-upload ke Situng itu adalah ... apa ... C-1 berhologram atau Salinan C-1 berhologram yang dari TPS langsung dikirim ke KPU kabupaten, berarti yang ada di Situng itu, ketika di kecamatan ada koreksi, maka yang ada di Situng itu belum terkoreksi? Karena sudah di-upload? Betul, gitu ya?

623. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Bisa di-upload ulang nanti waktu sampai di KPU (...)

624. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ndak, ndak, sebentar. Yang ... yang ini kita jangan bicara dulu soal perbaikan ini.

625. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

626. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, ini kan sudah di-upload?

627. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

628. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sementara yang aslinya ini masih berjalan, melalui beberapa jenjang untuk dilakukan koreksi. Betul, kan?

629. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul, betul, Yang Mulia.

630. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, apakah ketika misalnya koreksi itu dilakukan pada tingkat PPK, langsung juga dilakukan koreksi pada tingkat dikore ... lakukan koreksi untuk Situng?

631. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kalau ini, enggak. Jadi, tidak ada koreksi terhadap C-1. Koreksinya pada DAA-1 nya.

632. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, ya, betul. Itu isinya, itu kan nama formnya saja, nama formnya saja itu, Pak Nurdin. Maksud saya adalah perolehan suara yang sudah dituangkan di dalam C-1 berhologram asli itu kan direkap di tingkat kecamatan. Kalau ada kekeliruan-kekeliruan di situ, itu kan direkap, jadi dapat dikoreksi.

633. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, betul.

634. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, yang tadi ini yang sudah terlanjur masuk di Situng, itu kan tidak dikoreksi.

635. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, tidak dikoreksi. Karena tidak dijumlah bertingkat.

636. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, pertanyaan saya, kapan dilakukan koreksi terhadap ada yang sudah masuk di Situng atau memang tidak pernah dikoreksi lagi?

637. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Nanti ada upload terhadap DA-1 kecamatan, di kecamatan itu kelihatan perolehan suara untuk tingkat kecamatan yang berangkat dari desa.

638. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Berarti DA-1 juga di-upload juga?

639. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Di-upload juga, DB-1 di-upload.

640. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ke Situng juga?

641. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, tapi itu tidak masuk pada perubahan atas C-1. Jadi, C-1 nya sendiri tidak diubah.

642. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak diubah?

643. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak diubah, betul. Tapi pada (...)

644. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, C-1 yang awal (...)

645. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Suara pada (...)

646. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

C-1 yang awal di-upload itu, itu tidak pernah diubah lagi?

647. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak pernah diubah lagi.

648. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tetapi, substansi yang ada di C-1 itu.

649. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kecuali untuk yang PSU. Jadi, seperti kemarin, misalnya yang ditanyakan ada 1 TPS, di TPS 28 begitu, kan.

650. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke. Baik.

651. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Nah, itu kalau ada (...)

652. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, su ... subs (...)

653. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

PSU yang diupload.

654. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi, substansi yang ada di C-1 yang sudah di-upload di Situng itu, itu kan tampil apa adanya.

655. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, betul, sebagai bentuk koreksi.

656. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, tetapi, menurut Kuasa Termohon tadi, substansi yang ada di dalam atau angka-angka yang ada di dalam C-1 itu ... itu akan terkoreksi secara berjenjang.

657. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia. Melalui rapat pleno terbuka tadi.

658. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Dan itu di-upload juga?

659. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Di-upload dalam bentuk DA-nya.

660. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, betul. Itu, itu formnya saja, itu formnya, di-upload juga kan?

661. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, pada tingkat kecamatan.

662. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kalau di tingkat kecamatan tentu formnya lain.

663. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul.

664. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Di tingkat kabupaten formnya lain.

665. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul.

666. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Di tingkat provinsi formnya lain.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Betul.

668. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dan itu di-upload semua?

669. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Di-upload pada tingkat kabupaten, DB, kemudian ke tingkat-tingkat (...)

670. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Provinsi (...)

672. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sudah klir, klir kalau itu, Pak. Nah, penegasan yang saya minta ke Prof sebagai Ahli, tadi kan Prof. menyampaikan ada beberapa yang menurut tracing-nya Prof. itu terjadi kekeliruan me-upload, betul?

673. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul.

674. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Berarti yang Prof. sampaikan tadi kurang lebih 800? Atau berapa itu, Prof?

675. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

600 (...)

676. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

600, ya?

677. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

633.

678. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

633?

679. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Per ... per tanggal 10 Juni.

680. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Per tanggal 10 Juni. 633 per tanggal 10 Juni. Berarti ... apa namanya ... hasil temuan Ahli atau Profesor ini, itu adalah yang di C-1 awal, salinan C-1 yang di-upload? Betul, ya?

681. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul, tetapi fokusnya hanya pada perolehan suara saja, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul, betul, tapi (...)

683. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Yang tidak memiliki perolehan suara tidak dihitung.

684. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itulah betul, tapi yang 633 tadi itu adalah C-1 ... salinan C-1 yang sudah di-upload?

685. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

686. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Dan itu pada tingkat TPS. Tadi, Termohon sudah menyatakan bahwa di tingkat PPK dilakukan koreksi, di tingkat kota dilakukan koreksi lagi, kabu ... apa ... provinsi dilakukan koreksi lagi, dan itu akan di-upload juga dengan nama formulir yang (...)

687. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Lain.

688. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Berbeda. Nah, pertanyaan saya Pak Prof, ada berapa persen dari 633 tadi yang sudah dilakukan pembetulan?

689. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Saya tidak tahu, Yang Mulia. Karena ini KPU yang bertugas jadi ... tapi data per tanggal 10 Juni itu adalah 633, mungkin sekarang (...)

690. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang masih keliru?

691. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya, yang keliru, tetapi bukan di perolehan suara, tapi lebih kepada tadi jumlah dan sebagainya, mungkin kalau sekarang berapa mungkin dari KPU bisa menjawab.

692. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke, ini kan angka-angka masuk terus, kan setiap hari, gitu.

693. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

694. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi berubah-ubah, gitu?

695. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

696. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, terakhir ke Prinsipal. Berapa persen yang sudah, katakanlah yang temuannya Prof. tadi 600 sekian? Berapa persen kira-kira dari 600 itu yang sudah dilakukan koreksi?

697. KUASA HUKUM TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING

Sebentar, Yang Mulia. Kami akan cek melalui web.

698. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya. Per ... per hari ini!

699. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Harus kami cek di website-nya dulu karena ini koneksinya masih macet.

700. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, gitu?

701. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Ya.

702. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke, kalau begitu, tetapi yang jelas bahwa koreksi juga berjalan setiap saat?

703. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul.

704. KUASA HUKUM TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING

Benar, Yang Mulia.

705. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Cukup? Terima kasih.

706. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Satu lagi, Pak. Saya.

707. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Prof. Enny, silakan!

708. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya yang terakhir Prof Marsudi. Karena ini tadi soal lebih teknis, kalau saya ini kepada keahlian dari Prof. Marsudi, ya. Jadi, ini menarik, Pak, kan evolusinya sejak 2003, yang tadinya masih sangat simpel sekali, hanya tempelkan saja begitu C-1, sekarang sudah sedemikian rupa proses evolusinya itu.

Pertanyaan saya begini Prof Marsudi, kalau kemudian dilihat dari sisi komparasi ya, benchmark negara-negara mana yang punya model seperti Indonesia? Jadi, ini ada satu website virtual, kemudian ada Situngnya sendiri yang diamankan itu tadi, yang kemudian ini yang satunya adalah untuk sebenarnya akses publisitas, kan begitu, yang terkait dengan website virtual itu. Ini model seperti ini sebetulnya ada di negara mana, Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama.

Yang kedua, dari sisi keahlian Prof Marsudi, sebetulnya dilihat hasil yang sekarang dari evolusi dari 2003 itu, masih ada tidak, Pak titik lemah dari sistem Situng itu sendiri? Itu saja Pak, dua Pak.

709. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada sistem yang seperti ini se ... untuk tahun 2003, ya rata-rata seluruhnya, hampir semuanya menggunakan seperti itu. Karena waktu itu teknologi pengamanan belum secanggih sekarang. Kalau ke depan, mungkin dengan ada teknologi baru seperti blockchain dan yang lain-lain, mungkin akan berubah. Karena kita ini negara yang masih mencoblosnya pakai kertas, menghitung kertas, tapi ... ya, termasuk menurut saya sebagai orang IT primitiflah kita ini, kan, masa pemilu masih mencoblos, kemudian menghitung pakai kertas, tapi apa boleh buat, kita tinggal ... memang di negara kita, ya.

Untuk tahun 2003, memang rata-rata solusinya seperti itu. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi, apakah masih ada seperti itu karena sebagian besar sudah bergerak menuju elektronik voting yang mungkin

suatu saat, kalau Yang Mulia di MK ini bisa memutuskan, elektronik voting itu jauh lebih aman dan lebih cepat sebetulnya karena kalau dulu pengamanannya masih sulit, kalau sekarang dengan blockchain itu hampir tidak mungkin bisa dimanipulasi oleh siapa pun juga.

Nah, pertanyaannya yang kedua tadi ... apa tadi jadi lupa malahan (...)

710. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari pandangan Ahli, masih ada tidak, Pak (...)

711. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Oh, ya.

712. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Titik lemahnya dari (...)

713. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Betul, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, Situng itu bagi saya adalah alat yang sangat-sangat penting dan sangat berguna untuk mengajak partisipasi masyarakat. Kalau tidak ada Situng, mungkin masyarakat hanya punya praduga-praduga, kemudian bisa menjadi bola liar di media sosial, akhirnya bisa terjadi hal-hal yang kurang baik.

Nah, dengan adanya Situng ini semua pihak bisa ikut berpartisipasi. Tadi saya beri contoh, misalnya temen-temen saya yang di jaga TPS, di Negrit, di Kawal Pemilu, semuanya juga ikut memonitor di sana. Tetapi, memang Situng yang sekarang, ini kalau menurut saya punya kekurangan, itu saya tulis di blog saya mengenai Situng Jilid 2, ya.

Harusnya itu, Situng itu menampilkan antara data yang tervalidasi dan yang belum divalidasi, di tempat yang terpisah. Sekarang antara data tervalidasi dan yang belum tervalidasi jadi 1. Akibatnya, terjadilah tadi. Jadi, data yang salah maupun data yang benar itu kumpul jadi 1.

Nah, kalau saya boleh memberi masukan untuk KPU berikutnya, itu nanti kalau menampilkan itu, tampilkanlah 2 halaman yang berbeda. Ini data yang sudah tervalidasi, sehingga kalau dicek semuanya valid, benar, gitu.

Satu lagi adalah yang belum tervalidasi. Di dalam ... apa ... bidang sistem informasi itu sah-sah saja selama kita menyatakan bahwa ini memang belum divalidasi, sehingga masyarakat bisa memberi masukan untuk dikoreksi dan sebagainya.

Nah, dengan demikian, nanti keributan semacam ini mudah-mudahan tahun 2024 enggak terjadi lagi karena masyarakat sudah tahu,

ini memang datanya belum valid, ini sudah valid. Ini yang saya usulkan nanti untuk teman-teman KPU di masa depan di 2024.

714. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Baik. Mungkin terakhir, jika ada tanggapan dari Bawaslu, Pak Abhan?

715. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon?

716. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Ya.

717. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kalau boleh, ada tanggapan dari Prinsipal Ketua KPU terkait hal ini.

718. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Silakan, ya!

719. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Prof untuk masukannya. Insya allah, nanti KPU periode berikutnya akan me ... mencoba mengaplikasikan itu.

Pertanyaan Prof. Enny tadi terkait dengan ini, sebetulnya praktik semacam ini belajarnya di mana sih? Di negara mana? Praktik ini sepanjang yang saya tahu, saya kebetulan bersyukur bisa pergi ke banyak negara lihat pemilu, 5 benua saya sudah pernah kunjungi pemilunya.

Praktik ini praktik yang pertama di dunia. Menampilkan scanning Berita Acara dari TPS dan hasil penghitungannya. Ini praktik pertama yang dilakukan di ... sepanjang yang saya tahu, ya, di seluruh dunia. Oleh karenanya, ketika saya mempresentasikan tentang hal ini di banyak pemilu di banyak negara, justru kemudian banyak negara itu mau belajar ke Indonesia tentang Situng ini. Itulah mengapa, kami merasa keberadaan Situng cukup penting. Bukan hanya dia penting secara teknis untuk memberikan informasi, tapi dia penting untuk membangun kredibilitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap pemilu itu sendiri.

Jadi, saya ingin menambahkan itu saja. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga bersama-sama. Karena ini praktik sangat baik yang justru akan jadi rujukan penyelenggara pemilu dari banyak negara.
Terima kasih, Yang Mulia.

720. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Tadi mungkin Pak Abhan dari Bawaslu ada tanggapan?

721. BAWASLU: ABHAN

Bawaslu cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

722. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Saya kembalikan kepada Ketua.

723. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Mohon izin, Pak Ketua Yang Mulia, mohon izin, ya.

724. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, apa?

725. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Mohon izin. Saya secara moral izinkan mengucapkan mohon maaf kepada Profesor Marsudi karena beliau adalah orang yang lebih tua dari saya. Kalau tadi saya sempat ... apa ... karena style pengacaranya, ya, begitu, Pak, ya. Jadi, tanpa bermaksud saya untuk me ... apa, ya merendahkan Profesor. Dan saya paham, ada wilayah-wilayah tertentu tadi yang diberikan penjelasan oleh Profesor yang ketika saya kejar memang setop di situ. Dan kalau ada yang saya memaksa Prof untuk ... apa ... menjawab di luar ranah keilmuan Prof, saya mohon maaf.

Tapi izinkan juga, Yang Mulia, ada ruang kosong yang hari ini belum dijawab. Karena tadi tidak bisa dijawab oleh Profesor Marsudi. Yang belum dijawab adalah bagaimana bisa memastikan bahwa sistem informasi atau Situngnya KPU itu adalah menurut Undang-Undang ITE Pasal 15 ayat (1), dia adalah sistem harus secara hukum dia oblige to do? Apa jaminan yang ... apa ... bagaimana KPU bisa memberikan garansi kepada publik? Ini kan kita sudah bicara di ruang peradilan. Bahwa sistemnya itu adalah valid. Bahasa hukumnya handal, aman, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini, belum ada jawaban dari KPU.

Kami sebagai orang yang berada di luar negara, itu sudah mencoba membuktikan secara scientific bahwa ada yang salah dengan data-data yang di KPU dan termasuk juga proses entri data di KPU. Kami sudah membawa orang-orang yang expert dan kami membuktikan dengan simulasi.

Pertanyaannya adalah supaya kita fair, bagaimana juga KPU bisa menjelaskan secara scientific, ya, untuk mengatakan bahwa data kami juga bisa benar atau salah? Scientific pendekatannya, tidak berdasarkan kemudian asumsi-asumsi. Kami membawa para pakar ke sini. Kebetulan pakar yang hadir di sini tidak berkorelasi langsung dengan apa yang disampaikan oleh pakar kami sebelumnya. Ada ruang kosong yang belum dijawab oleh KPU.

Terima kasih.

726. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, sebetulnya, kan dari keter (...)

728. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar! Sebentar!

729. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini, Saudara Kuasa Pemohon. Sebentar, ya, Kuasa Termohon! Kalau Anda menghadirkan Ahli, itu kan kepentingannya untuk kepentingan dalil-dalil dalam Permohonan Saudara, ya, ya? Oke? Kemudian, kalau ada pihak lain menghadirkan ahli, ada pula kepentingan yang dipertahankan. Itu tidak bisa dibantah. Jangan dipaksakan ada pertemuan antara apa yang kepentingan Pemohon dengan kepentingan Pihak Termohon atau Pihak Terkait, ndak mungkin karena kepentingannya berbeda. Di situlah ada Hakim untuk menilai fakta-fakta yang tersaji di ruang sidang itu, satu.

Yang kedua. Kalau terkait misalnya, soal keamanan, itu mungkin bisa ditanya sekarang. Apa yang dia ... yang di ... KPU lakukan, bisa enggak dijelaskan oleh KPU soal keamanan ini? Apa saja langkah, tindakan yang dilakukan selama ini oleh KPU, agar data yang tersaji di Situng dan web Situng itu, bisa dijaga keamanannya? Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

730. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ini, Ketua.

731. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan, Pak Ketua.

732. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ahli tadi, sudah cukup jelas. Orang bisa saja menyerang kita, tapi dia hanya bisa menyerang di web Situng kita. Data Situng ini, ndak akan pernah terganggu. Kalau saya sering bicara dengan teman-teman media, saya selalu sampaikan begini, "Orang banyak masuk ke dalam halaman rumah kita, tapi tidak pernah bisa masuk ke dalam rumah kita." Saya selalu mengatakan begitu. Jadi, kalau ada apa-apa, enggak apa-apa, biasa saja. Karena nanti setiap 15 menit dia akan me-refresh dan datanya orisinal yang dimasukkan dalam Situng kita, itulah yang ditampilkan, gitu, lho.

733. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, Pemohon, jangan dipaksa lebih juga.

734. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya.

735. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu paling tidak dia sudah menjawab (...)

736. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Yang Mulia?

737. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dan Ahli sudah menjawab tadi.

738. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Ya, terima kasih.

Kami tidak ada pretensi untuk memaksa, tidak. Cuma ini hak kami untuk mengkonfirmasi. Tetapi menurut kami, ya, tetap menghargai pendapat dari Ketua KPU. Jawaban verbal KPU itu tidak cukup karena tidak pernah menjelaskan bahwa bagaimana sistem informasi bisa dijamin keamanannya? Itu tidak semudah seperti itu.

739. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kalau begitu saya yang nanya ke (...)

740. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Itu catatan saja.

741. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

742. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Karena ada auditnya, ada assessment-nya secara teknologi yang harus dilakukan. Apakah itu sudah pernah dilakukan, gitu?

743. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu satu, catatan untuk KPU.

Tapi pertanyaan saya yang begini faktual saja. Sudah pernahkah ada peristiwa pidana di mana ada penerobosan cyber terhadap KPU dan itu terbukti di pengadilan dan orangnya dipenjara karena menerobos sistem keamanan itu?

744. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Ada. Yang melakukan hack terhadap sistem kita, ada.

745. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

746. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Dan dia, sekali lagi saya ingin sampaikan, dia hanya bisa masuk di halaman kita (...)

747. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah.

748. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Tidak pernah bisa masuk ke dalam rumah kita.

749. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu maunya pertanyaan saya yang kedua, kalau sudah (...)

750. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Ya, oke.

751. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara jawab tidak ... tidak saya lanjutkan.

752. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Terima kasih.

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, minta izin sedikit?

754. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Saya ingin mengklarifikasi sedikit saja, sehubungan dengan apa yang disampaikan Pemohon dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Suhartoyo, khawatir saya timbul salah persepsi di masyarakat karena sidang ini disaksikan langsung oleh masyarakat kita.

Yang ingin saya kemukakan itu tentang audit klaim, melakukan audit forensik. Kalau sesuatu itu terkait dengan forensik, itu pasti harus dilakukan oleh satu institusi yang resmi dalam konteks adanya investigasi kriminal, penyidikan suatu kejahatan, katakanlah orang dibunuh, terus polisi (...)

756. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Prof. Yusril ... Pemohon ... apa ... sebentar. Pak Ahli boleh istirahat ... istirahat dulu. Kasihan juga walaupun umurnya 60, masih kuat katanya, tapi kan ... ini ada tempatnya disediakan di sini, di sini. Silakan duduk.

Lanjutkan ... apa ... Kuasa Pihak Terkait.

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Saldi.

Ada orang dibunuh, polisi menyidik ragu-ragu untuk memastikan, polisilah yang meminta kepada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, misalnya untuk melakukan suatu bedah mayat dalam rangka penerapan ilmu kedokteran forensik, hasilnya ada visum.

Ada kecurigaan suatu lembaga melakukan korupsi, maka dimintalah BPK untuk melakukan audit forensik, hasilnya diserahkan. Ada diduga pemalsuan tanda tangan, orang mati juga dengan diracun dan lain-lain, bisa juga minta Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk melakukan penyidikan.

Jadi, sifat penyidikan forensik itu resmi dan hasilnya dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke pengadilan. Saya agak khawatir, oleh karena Kuasa Hukum Pemohon itu mengklaim menghadirkan seorang Ahli di persidangan ini, dan Ahli itu mengklaim dia melakukan audit forensik terhadap KPU.

Ini masalah serius bagi saya, kalau ahli, ya, ahli. Tapi, kalau dia melakukan audit forensik. Pertanyaannya, siapa yang meminta orang yang bersangkutan untuk melakukan audit forensik? Adakah indikasi atau dugaan kejahatan IT yang dilakukan oleh KPU atau kita menuduh KPU ini melakukan suatu kejahatan sistematis, melakukan kecurangan, sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo kalah, Pak Jokowi menang, sehingga perlu dilakukan audit forensik? Saya kira tidak ada.

Tiba-tiba ada orang dari Jepang, ada orang katanya mengajar di Malaysia, tidak pernah kerja di Indonesia, mengklaim melakukan audit forensik. Saya kira ini perlu diluruskan, supaya masyarakat itu tidak salah, "Lho, kok sudah diaudit forensik, kok malah ditolak oleh pengadilan?" Saya kira ini perlu untuk dijelaskan supaya tidak timbul kesalahpahaman. Demikian, Yang Mulia.

758. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Yang Mulia, mohon izinkan saya menjawab statement dari Profesor Yusril?

759. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

760. KUASA HUKUM PEMOHON: IWAN SATRIAWAN

Yang pertama, saya kira pernyataan bahwa yang boleh memi ... memohon untuk melakukan audit forensik dalam kasus pidana. Itu tidak hanya lembaga negara.

Kasus terorisme, kemarin di Klaten. Saya adalah satu lawyer dari orang yang meninggal. Pengajuan permohonan untuk audit forensik itu tidak dilakukan oleh negara, tapi dilakukan oleh organisasi sosial masyarakat, yaitu Muhammadiyah, yang bersama dengan Ikatan Dokter Forensik Indonesia. Jadi, saya tidak setuju, mungkin profesor punya landasan sendiri. Nah, begitu, ya.

Jadi tidak harus. Jadi, negara ini adalah bagian dari check and balances, mechanism antara state and society. Dia tidak semuanya harus dengan state, karena apa? State itu punya kepentingan juga. Kami mengajukan itu kepada polisi, polisi tidak melakukannya, sehingga akhirnya yang bergerak adalah civic society. Itu.

Yang kedua, terkait dengan KPU ini. Sebetulnya, permintaan dari civic society untuk melakukan audit forensik IT ya, bukan audit forensik ... otopsi forensik, ya. Audit forensik IT sudah ba ... ada saya baca di media. Tapi sampai sekarang, KPU tidak pernah saya dengar meresponsnya. Itu saja. Terima kasih.

761. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

762. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya menambahkan. Diskusi ini kemudian bisa tidak ... bisa panjang. Mengingat begini, masing-masing pihak sesungguhnya sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan, kalau Pemohon, dalil-dalil permohonannya tergu ... Termohon ada dalil-dalil Termohonnya. Terlepas dari sisi pandang dan juga Pihak Terkait untuk besok.

Terlepas dari sisi pandang masing-masing, pasti akan mengatakan bahwa masing-masing akan mengatakan ada kekurangan untuk satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya, itulah yang dalam sebuah media persidangan seperti ini, karena kita merujuk pada persidangan speedy trial dan pengalaman persidangan sebelumnya, yang kita tidak mengenal ada kesimpulan. Sesungguhnya, keberatan-keberatan dan apa saja yang menurut para pihak tidak sepaham, itu sebenarnya dituangkan, bisa dituangkan dalam kesimpulan.

Namun, ini juga Mahkamah bisa menggunakan Pasal 55. Tapi walaupun tetap konsisten dalam persidangan pilpres sebelumnya yang tidak mengenal kesimpulan, ya bagian keberatan-keberatan ini akan dengan sendirinya ter-cover dalam risalah. Yang tentunya, masing-masing akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Sekali lagi, seperti apa yang disampaikan Pak Palguna bahwa kalau masing-masing kemudian berargumentasi dan argumentasi itu harus dipaksakan untuk ketemu, ya jelas tidak mungkin. Itulah justru namanya pengadilan, ada di tengah. Dikeroyok oleh beberapa pihak begini, nah Mahkamah yang nanti akan mengambil sikap.

Memang persoalannya adalah media ini yang kemudian kita tidak mengenal dalam sebuah wadah kesimpulan itu. Tapi, tanpa mengurangi esensi daripada apa yang menjadi keberatan para pihak dengan peralatan Mahkamah yang sudah cukup modern, titik, koma, bahkan kata-kata apa pun yang disampaikan oleh para pihak, sudah ter-cover di dalam risalah sidang itu sendiri.

Mungkin itu saja, kalau persoalan ini saya kira tidak perlu diperpanjang. Kita tunggu besok acaranya, dari Pihak Terkait untuk mengajukan pembuktian, saksi. Barulah terakhir nanti, kalau ada hal-hal yang tidak seperti apa yang di kehendaki oleh masing-masing pihak, argumen permohonan, argumen bantahan, argumen keterangan untuk Pihak Terkait, Mahkamah akan memberikan kesempatan itu untuk menyampaikan.

Barangkali jalan keluarnya itu, Pak Ketua. Kecuali nanti kita memang menggunakan media Pasal 55, kemudian mengakomodir, tapi kan itu juga kita perlu pertimbangan-pertimbangan persidangan sebelumnya. Karena kita tidak pernah mengenal untuk itu, kan? Terima kasih.

763. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Arief?

764. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya hanya khawatir dengan terakhir apa yang disampaikan Pemohon. Begini.

Jadi pihak Pemohon itu dalam petitumnya kan, minta supaya ditetapkan suara yang benar adalah ini. Yang didasarkan kepada perhitungan audit forensik yang disampaikan oleh ahli tadi pagi. Sehingga, mendesak kepada Pemohon, supaya di dalam Situngnya itu juga, dari Termohon supaya di dalam Situngnya juga bisa mengemukakan itu.

Tapi kita harus ingat bahwa untuk menetapkan perolehan suara yang benar, itu bukan dari Situng, bukan dari itu. Undang-undang jelas

mengatakan begini, ini baru saja ditegaskan oleh Ahli, Prof. Wahyu. "Hasil Situng, bukanlah hasil resmi. Hasil resmi adalah hasil penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang. Sehingga, Situng tidak mempengaruhi atau tidak digunakan untuk penghitungan suara resmi."

Jadi, kalau mau mengadu, apa yang disampaikan tadi malam, itu ya diadu dengan menurut undang-undang yang resmi adalah penghitungan suara secara berjenjang yang manual itu. Ini jelas karena di dalam undang-undang mengatakan itu. Lah, sekarang tadi Pak Ketua KPU juga sudah menyampaikan, "Lho, kok harus ada Situng?" Ini baru dipraktikkan di Indonesia. Sekali lagi undang-undang mengatakan begini, "Urgensi sebagai mekanisme keterbukaan akses informasi, akuntabilitas, dan kontrol masyarakat."

Jadi fungsi dari Situng itu, bukan untuk menentukan suara perolehan suara yang benar. Ini harus supaya semuanya tahu persis, sehingga dalam persidangan-persidangan praktik di pilkada, kita selalu mengecek, C-1 yang berhologram, C-1 Plano yang berhologram mana? Tunjukkan KPU!

Kalau Pemohon punya, apakah data itu resmi atau tidak? Gimana, menurut Pihak Terkait? Itu selalu begitu. Jadi yang dipakai adalah penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS sampai ke tingkat nasional. Terima kasih.

765. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada terakhir, Yang Mulia Prof. Enny?

766. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mungkin begini, ini sudah selesai dengan Ahli saya kira, ya. Hanya satu yang kemarin masih ada hal yang perlu kita selesaikan, soal amplop. Sudah dibawa belum dari KPU, amplop yang untuk kita sandingkan dari yang dibawa oleh Saksi Pemohon dengan yang dari KPU? Kalau ada nanti kita coba.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia? Sebelum lanjut, apakah diizinkan bila Prof. untuk keluar, ya?

768. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dan ada paper tertulisnya, nanti kami ajukan ini juga buat Yang Mulia sudah kami kopi 12 kali, bisa diambil.

770. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Ahli Prof. Ya, aduh, ya seharusnya ya, dari tadi ya, terima kasih sekali lagi, ya.

Ya, tapi sebenarnya begini, Prof. Saya ingin menyampaikan apa ... komentar atas permohonan maaf dari Kuasa Pemohon tadi, memang ya begitulah seperti yang saya sampaikan pada awal sidang bahwa sidang ini disaksikan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, maksud Kuasa Pemohon itu adalah dalam rangka mencari kebenaran untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Terima kasih sekali lagi.

771. AHLI DARI TERMOHON: MARSUDI WAHYU KISWORO

Izinkan saya menjawab, Yang Mulia. Saya juga mohon maaf, kalau dalam sesi ini saya banyak menggurui karena saya ini guru, jadi kalau enggak menggurui, namanya enggak bekerja. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

772. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, silakan KPU! Silakan, tadi yang diminta oleh Prof. Enny.

773. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Sambil menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di Boyolali kemarin.

774. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

775. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Jadi ini amplop sama dengan amplop yang dibawa kemarin. Nah, amplop yang ada di kecamatan (...)

776. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Pihak Terkait siapa yang mewakili? Sekalian.

777. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Yang pertama, memang sampulnya jenisnya ... terima kasih, Majelis. Sampulnya memang jenisnya macam-macam dan kemudian juga ukurannya beda-beda karena tergantung apa yang akan dimuat di dalam sampul. Yang pertama, itu ada sampul model, salinan untuk Formulir Model C-1. Di dalamnya ada identitas TPS.

C-1 yang ukurannya ... ukurannya tidak besar, ukurannya kecil. Ini kodenya di luar kotak, di dalam ... di bawah itu ada kodenya di luar kotak suara. Nah, kodenya itu di luar kotak suara. Nanti biar dicocokkan dulu, Mas. Ukurannya kecil. Di dalam kotak, ya. Ya, ini formulir untuk di luar kotak, ya nanti ada yang lain lagi.

Yang kedua, sampul TPS kabupaten/kota untuk surat suara rusak atau keliru coblos.

778. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama enggak ininya, kualitas ininya?

779. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Beda, Bu.

780. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Beda? Di mana bedanya?

781. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, ini lebih tebal kalau yang dicoblos ini. Tapi intinya, bisa jadi tiap provinsi beda karena yang mengadakan KPU provinsi. Standarnya sama, inggih.

782. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang belum dipakai, ya? Karena belum ada dicantumkan, berapa lembarnya, ya?

783. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Betul.

784. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

785. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Demikian juga yang ditemukan kemarin di bagian kolom sebanyak titik-titik lembar karena kosong, dalam pandangan kami berarti tidak pernah dipakai untuk apa-apa. Yang ini! Karena masih kosong. Ya, kalau ... kalau ada mesti ada tulisan berapa lembar yang ada di dalam.

786. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada bekas lemnya, tho?

787. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Betul. Kalau yang ini yang disampaikan oleh saksi kemarin tidak ada bekas lem, tidak ada bekas ... apa ... segel, enggak ada. Yang berikut (...)

788. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Baik, tunggu dulu ... apa namanya ... Pemohon lihat, ya! Enggak ada bekas lemnya, ya?

789. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Tidak ada.

790. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bisa dilihat?

791. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Bisa. Sejak tadi (...)

792. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Saya tanya ke Pemohon! Jangan KPU yang nanyain ... yang jawab!

793. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Oh, ya, maaf.

794. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Bisa dilihat tulisannya, Prof?

795. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan! Yang pertanyaan saya dulu, ada bekas lemnya enggak?

796. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Ini sudah kering. Sudah kering enggak bisa dipakai, enggak bisa kelem.

797. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba contoh yang ... yang apa ... yang punya KPU yang baru tadi? Kalau dia sudah dipakai ada tanda perobekan. Kalau ... kalau barang sudah dilem, dibuka, kemungkinan robek, ya.

798. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, tidak simetris lagilah istilahnya.

799. KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL ALMIR

Tadi memang di sini tidak ada jumlah lembar, tapi yang ada nama, kemudian kecamatan-kecamatan dan nomor TPS, ya.

800. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang itu DPRD, ya?

801. KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, kebetulan ini DPRD. Ya, kemarin pilpres. Pilpres sudah diserahkan, ya.

802. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Kami lanjutkan.

803. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan.

804. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Yang berikutnya sampul surat suara sah, ini di dalam kotak suara. Contohnya ini, ya. Untuk surat suara sah.

805. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berarti kalau ini surat (...)

806. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Bukan ... bukan yang itu.

807. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini, ya? Ini berarti sama dengan ini, ya?

808. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, betul.

809. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untuk judul sama dengan ini?

810. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Betul, inggih.

811. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini sampul surat suara sah.

812. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya.

813. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini persis sama dengan ini?

814. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Betul. Kalau digunakan kan berarti surat suara sah pasti kan pasti dimasukkan ke situ. Pasti dilem, pasti disegel. Kalau melihat ini kan ... ini

kan ... apa namanya ... di dalam kotak. Kalau melihat ini ... ini kan tidak ada bekas lem, tidak ada bekas segel. Jadi, boleh dikatakan ini belum pernah dipakai yang disampaikan.

815. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sabar!

816. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Majelis, kalau dikatakan ini belum pernah dipakai, bagaimana bisa itu sampai 5 dus?

817. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Tanya pada saksi Anda, bos.

818. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Termohon (...)

819. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Enggak! Ini gini ... ini kan kita cuma mengkonfirmasi ini karena barang ini sudah selesai kemarin, ya. Jadi, kami hanya perlu menambahkan keyakinan saja. Jadi kalau Anda memberikan catatan ada keberatan itu sudah tercatat di ... apa ... di risalah sidang, oke?

820. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Kalau dokumen resmi negara, tentunya kalau 5 dus itu ada Berita Acara pemusnahan atau dibuang. Dalam praktiknya, kalau dokumen yang berkaitan dengan publik tentu ada Berita Acara pemusnahan dokumen.

821. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya.

822. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Itu sampai 5 ... hampir sampai 5 dus, bagaimana KPU bisa menjelaskan ke KPU des ... menjelaskan bahwa bagaimana mungkin itu bisa hampir 5 dus itu dibuang percus ... ada di dekat-dekat KPU yang di Anyer itu?

823. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Apakah boleh menjawab, Majelis?

824. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

825. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ya, kalau begitu menurut saya yang pertama, keberatan Kuasa Hukum Pemohon itu harap ditanya kepada saksi, dapatnya dari mana? Karena yang berikutnya, begini, dalam keterangan yang pertama di bagian awal, saksi mengatakan, "Datang ke sana tidak bawa mobil, sehingga enggak bisa bawa.

826. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sabar!

827. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Kemudian belakangan dia mengomong, "Bawa mobil, bisa bawa banyak." Enggak konsisten.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, Yang Mulia. Dari Termohon (...)

829. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah, ya! Ini sudah dilihat, ya! Silakan kembali ke tempat duduk! Ya, kembali ke tempat duduk!

830. KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL ALMIR

Tadi kami ingin tegaskan, Yang Mulia. Memang ada tulisan, tapi memang ada tulisannya. Ada nomor TPS, ada nomor segala macam.

831. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Dorel, kembali duduk!

832. KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL ALMIR

Ya, Yang Mulia.

833. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon?

834. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

835. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya ingin menambahkan saja apa yang sudah dijelaskan Pak Hasyim. Jadi, kenapa jumlah amplop kemarin disampaikan begitu banyak berkumpul di dalam ... apa ... karung-karung plastik itu? Memang di setiap TPS, kadangkala ada jumlah amplop yang berlebih karena jumlah pemilihnya sedikit, dokumennya jadi sedikit, sehingga ada amplop yang lebih.

Nah, amplop yang lebih di wilayah kecamatan itu dikumpulkan di kecamatan. Jadi, itu adalah amplop-amplop yang memang belum dipakai. Dan di situ (...)

836. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, Pak Ketua!

837. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Oke, baik.

838. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemarin soal ini sudah diperdebatkan.

839. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Oke, baik.

840. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kami sekarang memerlukan bahan yang datang dari KPU ke kami, kami akan nilai nanti dengan data yang ... atau bukti yang ada kemarin.

841. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Baik.

842. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak usah menjelaskan, nanti pendebatannya menjadi lain lagi, ya.

843. TERMOHON: ARIEF BUDIMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

844. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kepentingannya itu saja karena kan sekarang menyerahkan itu saja, tidak memperdebatkan itu lagi. Terima kasih.

845. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

846. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Catatan sedikit, Yang Mulia.

847. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

848. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULFADLI

Ya, ini terkait dengan barang bukti seperti yang disampaikan oleh saksi kemarin. Kalau dalam suatu proses hukum, jaksa saja memusnahkan barang bukti, misalnya dengan narkoba ... sisa narkoba, itu ada Berita Acara pemusnahan. Ini hampir sampai 5 karung diletakkan sebegitu diantengkan begitu saja. Itu kan tidak ada pertanggungjawabannya. Kalau pihak KPU tanyakan saja ke saksi kemarin, itu namanya mengeles namanya. Cari apa ... cari apa ... dipukul orang, lari ke sini.

849. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini, Pemohon. Jadi keberatan Anda dicatat dalam risalah, nanti semuanya akan kami pertimbangkan. Terima kasih, Pak Ketua, dikembalikan.

850. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi semuanya akan dipertimbangkan nanti dalam putusan. Ya, sudah cukup, ya?

Terakhir, pengesahan ... bukti dari Termohon, tapi sebelumnya ini ada surat dari Kuasa Pemohon atas nama Pak Budi Rahman, S.H, M.H., yang isinya begini, "Kami selaku Kuasa dari Termohon pada Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/17/2019 terkait dengan daftar alat bukti di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat yang sudah dilakukan verifikasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun, beberapa masih belum lengkap dan yang menjadi catatan kekurangan dari hasil verifikasi yang tercantum di dalam T3B (Tanda Terima Tambahan Berkas), kami nyatakan tidak kami sampaikan sebagai bukti. Ada pun terhadap bukti lainnya di 3 provinsi tersebut yang sudah dimasukkan dan sudah lengkap kami nyatakan sebagai barang bukti." Benar?

851. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

852. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kemudian untuk bukti tambahan, Termohon. Pertama yang dari KPU RI, TB.I.KPU-018 sampai dengan TE.II.KPU-PAPUA-1002, TO.I.KPU-011 sampai dengan TE.I.KPU.PAPUA-1001. Benar, ya?

853. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

854. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian yang kedua ada dari DKI ... Provinsi DKI Jakarta, TE.II.PROV.DKI-JAKARTA-004 sampai dengan TE.II.PROV.DKI-JAKARTA-006. Benar?

855. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

856. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tiga, Sulawesi ... Provinsi Sulawesi Selatan

1. TD.IV.SULSEL.TORAJA-UTARA-003 sampai dengan TD.IV.SULSEL.TAKALAR-001.

2. TB.III.SULSEL.MAROS-001 sampai dengan TB.III.SULSEL.MAROS-002.

3. TC.III.SULSEL-001 sampai dengan TC.II.SULSEL.PALOPO-001.

4. TE.II.SULSEL-001 sampai dengan TE.III.SULSEL.PALOPO-001.

Benar?

857. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

858. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian Provinsi Jawa Tengah, TE.III.JATENG.BANJAR-NEGARA-003 sampai dengan TE.II.JATENG-004, benar?

859. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

860. KETUA: ANWAR USMAN

5. Provinsi Papua, TB.III.PAPUA.MIMIKA-001 sampai dengan TE.III.PAPUA.SUPIORI-001, benar?

861. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

862. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Provinsi Jawa Barat, TB.III.JABAR.BANDUNG-001 sampai dengan TE.III.JABAR.K-BOGOR-001. Kemudian TD.III.JABAR.K-SUKABUMI-001 sampai dengan TE.III.JABAR.BANDUNG-005, benar?

863. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

864. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

7. Provinsi Papua Barat, TB.II.PABAR-001 sampai dengan TE.III.PABAR.K-SORONG-007, benar?

865. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

866. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

8. Provinsi Sumatera Utara, TD.III.SUMUT.NIAS-007 sampai dengan TD.III.K-MEDAN-007, benar?

867. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

868. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

9. Terakhir Jawa Timur TD.III.JATIM-SIDOARJO-001 sampai dengan TE.III.JATIM-SIDOARJO-006, benar?

869. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Benar, Yang Mulia.

870. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, untuk agenda persidangan hari ini sudah selesai dan untuk sidang selanjutnya, ditunda besok hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, pukul 09.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan saksi dan ahli

Pihak Terkait, serta pengesahan alat bukti tambahan Pihak Terkait dan Bawaslu.

Ya, untuk daftar saksi dan ahli, ya supaya diserahkan lebih awal dan pokok-pokok keterangan yang akan disampaikan supaya dibuat sedemikian rupa, serta untuk ahli, ya CV-nya supaya diserahkan kepada kita sekalian.

871. BAWASLU: ABHAN

Siap, Yang Mulia.

872. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah cukup, ya?

873. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia? Dari Termohon, Yang Mulia?

874. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah penyampaian ini ke hadapan Majelis atau dibawa saja nanti untuk yang narasi dari Ahli?

876. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sekarang saja, silakan!

877. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih.

878. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Bawaslu, silakan!

879. BAWASLU: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami, terkait dengan bukti-bukti kami yang sudah kami ajukan yang kemarin ditanda PK-1 sampai PK-134 sudah diverifikasi dan sudah disahkan. Kemudian, yang bukti-bukti

lanjutannya adalah PK-135 sampai PK-206 ini tadi belum disahkan, sudah kami sampaikan ke Sekretariat Kepaniteraan. Oh, besok?

880. KETUA: ANWAR USMAN

Memang jadwalnya besok.

881. BAWASLU: ABHAN

Itu saja, Yang Mulia.

882. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tadi sudah disampaikan, ya?

883. BAWASLU: ABHAN

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

884. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah jelas semua, ya? Pemohon? Sidang ditunda besok, ya. Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk sidang hari ini, terima kasih.

Dan dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB

Jakarta, 20 Juni 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.